



**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
KELAS IB**



LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN

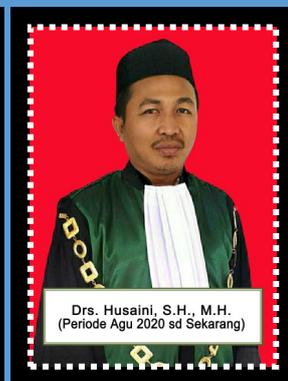
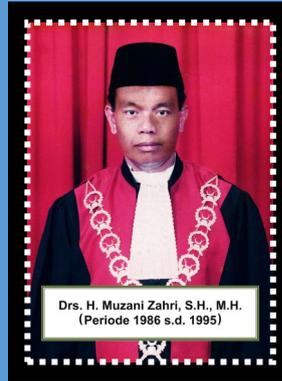
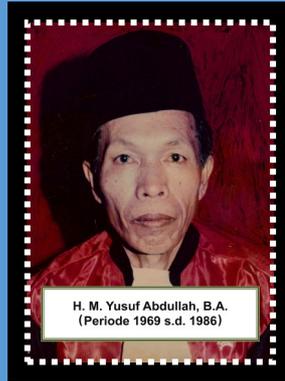
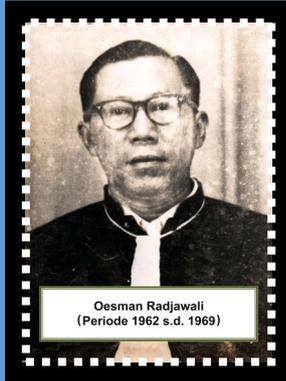
2021

SK ketua Pengadilan Agama Muara Enim
Nomor W6-A5/4350/OT.01.1/XII/2021
Tanggal 14 desember 2021

Kelompok Kerja Penyusunan
Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Tahun 2021

Ketua Sebelumnya

dari Tahun 1962 sampai Sekarang





VISI

" Mewujudkan Pengadilan Agama yang Agung "

MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Muara Enim



DRS. HUSAINI, S.H., M.H.

- Nip : 196812191994031001
- Tempat / tanggal Lahir : Aceh Selatan, 19 Desember 1968
- Pendidikan : Strata 2 (S-2)
- Pangkat : Pembina Utama Muda
- Golongan Ruang : IV/c
- Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
/ Hakim Madya Utama

JENJANG PENDIDIKAN

- Tahun 1982 : SD Negeri 1 Labuhan Haji
- Tahun 1985 : MTs Pesantren Persatuan Islam Bangil
- Tahun 1988 : MA Pesantren Persatuan Islam Bangil
- Tahun 1993 : S-1 IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Tahun 2004 : S-1 Hukum Universitas Muhammadiyah Banda Aceh
- Tahun 2016 : S-2 Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

RIWAYAT JABATAN

1. TMT 18/08/2020 : Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB
2. TMT 22/05/2019 : Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB
3. TMT 07/03/2018 : Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas IB
4. TMT 28/08/2013 : Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane Kelas II
5. TMT 16/09/2010 : Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang Kelas II
6. TMT 10/04/1999 : Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Kelas II
7. TMT 01/04/1998 : Panitera Pengganti / Calon Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Kelas II
8. TMT 01/06/1995 : PNS/Calon Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Kelas II
9. TMT 01/03/1994 : CPNS/Calon Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Kelas II

KETUA
PENGADILAN AGAMA
MUARA ENIM



SUSPAWATI, S.Ag.

- Nip : 197607102001122003
- Tempat / tanggal Lahir : Solok, 10 Juli 1976
- Pendidikan : Strata 1 (S-1)
- Pangkat : Pembina
- Golongan Ruang : IV/a
- Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama
Muara Enim / Hakim Madya Pratama

JENJANG PENDIDIKAN

- Tahun 1989 : SD Inpres Gantung Ciri Kabupaten Solok
- Tahun 1992 : MTs Negeri Balingka Kabupaten Agam
- Tahun 1995 : MA Negeri 2 Bukittinggi
- Tahun 1999 : S-1 Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang

WAKIL
KETUA
PENGADILAN AGAMA
MUARA ENIM

RIWAYAT JABATAN

- 1.TMT 28/07/2021 : Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Enim kelas IB
- 2.TMT 08/03/2019 : Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo
- 3.TMT 26/10/2018 : Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal
- 4.TMT 22/09/2018 : Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian
- 5.TMT 03/12/2012 : Hakim Pengadilan Agama Bangko
- 6.TMT 14/07/2009 : Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo
- 7.TMT 30/05/2006 : Kaur Kepegawaian Pengadilan Agama Muara Labuh
- 8.TMT 01/01/2003 : PNS Pengadilan Agama Muara Labuh
- 9.TMT 01/12/2001 : CPNS Pengadilan Agama Muara Labuh



Drs. HUSAINI, M.H.
Ketua PA. Muara Enim
Hakim Madya Utama
Pembina Utama Muda (IV/c)

Suspawati, S.Ag.
Wakil Ketua PA. Muara Enim
Hakim Madya Pratama
Pembina (IV/a)



H. Tamim, S.H.
Hakim PA. Muara Enim
Hakim Madya Utama
Pembina Utama Muda (IV/c)

Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.
Hakim PA. Muara Enim
Hakim Madya Muda
Pembina Utama Muda (IV/c)



Yeni Kurniati, S.H.I.
Hakim PA. Muara Enim
Hakim Pratama Utama
Penata Tingkat I (III/d)

Weri Siswanto Bad. S.H.I.
Hakim PA. Muara Enim
Hakim Pratama madya
Penata (III/c)



PROFIL PEJABAT STRUKTURAL



Drs. HUSAINI, M.H.
Ketua PA. Muara Enim
Pembina Utama Muda (IV/c)



Suspawati, S.Ag.
Wakil Ketua PA. Muara Enim
Pembina (IV/a)



Drs. Efendi.
Panitera PA. Muara Enim
Pembina (IV/a)



Syam Ratulangi, S.H.
Sekretaris PA. Muara Enim
Pembina (IV/a)



Azhari, S.H., M.Si.
Panitera Muda Permohonan
Penata Tingkat I (III/d)



Yeni Puspita, S.Ag.
Kepala Sub Bagian Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana
Penata Tingkat I (III/d)



Firdaus, S.H.I.
Panitera Muda Hukum
Penata (III/c)



Rahmi Oktaria, S.H.I.
Kepala Sub Bagian Umum dan
Keuangan
Penata (III/c)



Rendy A, S.H.I.
Panitera Muda Gugatan
Penata (III/c)



Azuardi Rizal, S.S.I.
Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Teknologi Informasi dan Pelaporan
Penata (III/c)

DAFTAR ISI

I Ketua Sebelumnya

II Visi Misi

III Profil Ketua

IV Profil Wakil Ketua

V Profil Hakim

VI Profil Pejabat Struktural

VII Daftar Isi

VIII Kata Pengantar

1 Bab I
Pendahuluan

5 Bab II
A. Keadaan Perkara

5 Keadaan Perkara Tingkat Pertama

7 Keadaan Perkara Tingkat Banding

8 Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

10 Keadaan Perkara tingkat Peninjauan Kembali

12 B. Penyelesaian Perkara

12 Jumlah sisa perkara yang diputus

12 Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

13 Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

14 Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi

14 Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi

15 C. Akreditasi Penjaminan Mutu
(Sertifikasi ISO Pengadilan)

15 Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)

16 Sidang keliling / pelayanan terpadu

17 Pelayanan sidang terpadu

17 Perkara prodeo (Pembebasan biaya perkara)

19 Bab III
Sumber Daya Manusia

20 Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan / golongan / pendidikan

23 Mutasi

24 Promosi

24 Pindah Tugas

24 Pensiun

25 Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

27 Bab IV
Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi

27 A. Pengelolaan Keuangan

34 B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

39 C. Pengelolaan Teknologi Informasi

39 Implementasi E-Court

41 Implementasi SIPP

42 Bab V
Peningkatan Pelayanan Publik

42 Akreditasi Penjaminan Mutu

49 Pelayanan Terpadu Satu Pintu

55 Inovasi Pelayanan Publik

76 Bab VI
Pengawasan

78 A. Internal

82 B. Evaluasi

84 Bab VII
Penutup

84 A. Kesimpulan

85 B. Rekomendasi

KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020, sebagaimana Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3111/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 14 Desember 2021 perihal tersebut, dengan ini Pengadilan Agama Muara Enim telah menyusun Laporan sebagaimana dimaksud.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Muara Enim merupakan media akuntabilitas kinerja yang ditarget dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja tersebut kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2021 yang akan menyusul kemudian.



Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Pengadilan Agama Muara Enim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2021 dan diharapkan juga dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang dilakukan secara lebih baik dalam rangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Muara Enim.

Muara Enim, 7 Januari 2022

Ketua,



Drs. Husaini, S.H., M.H.

NIP. 196812191994031001

Bab I

Pendahuluan

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi, Pengadilan Agama Muara Enim sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman yang diterbitkan dan ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Dengan berakhirnya tahun 2020 ini, maka Pengadilan Agama Muara Enim pun membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3111/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 14 Desember 2021.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini berisi mengenai kegiatan Pengadilan Agama Muara Enim pada tahun 2021, sebagai penyelenggara pelayanan publik Pengadilan Agama Muara Enim berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dan dalam mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Muara Enim mengambil kebijaksanaan untuk senantiasa berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama selaku penyelenggara pemerintahan negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Yaitu, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam yaitu :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Waqaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Sadaqoh dan
9. Ekonomi Syariah

Pengadilan Agama Muara Enim dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan Pengadilan Agama Muara Enim membuat Renstra 2020-2024 yang selalu di reviu dengan visi **“Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung”** sedangkan misi Pengadilan Agama Muara Enim, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Muara Enim.

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada visi

dan misi Pengadilan Agama Muara Enim. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara Enim sebagai berikut :

1. Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dengan senantiasa menciptakan lingkungan kerja serta kinerja aparatur Peradilan Agama Muara Enim yang profesional, bersih dari KKN, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dalam mencapai sasaran strategis, 4 (empat) hal tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Muara Enim untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturn Mahkamah Agung.
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama.

Dari program dan kegiatan tersebut, Pengadilan Agama Muara Enim melayani masyarakat pencari keadilan yang berada pada yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yang memiliki wilayah hukum 2 kabupaten yaitu Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Bab II

A. Keadaan Perkara

Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Muara Enim berdasarkan alur perkara dan jenis perkara adalah sebagai berikut :

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Muara Enim Berdasarkan Alur Perkara Tahun 2020

Alur Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa
Perdata Gugatan	10	1045	1055	1034	51	21
Perdata Permohonan	1	295	296	294	18	2
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
Jumlah	11	1340	1351	1328	69	23

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Muara Enim Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021												Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des				
Izin Poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispensasi Kawin	0	0	28	17	13	10	26	18	16	12	21	18	11	224	212	9	0
Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kelalaian atas Kewajiban Sumai / Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerai Talak	5	31	17	18	22	12	19	16	18	16	18	23	10	220	202	7	5
Cerai Gugat	4	102	72	63	63	48	88	59	75	65	69	64	38	806	745	41	16
Harta Bersama	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0
Penguasaan Anak	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3	1	0	0
Hadhahah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hak-Hak Bekas Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Perwalian	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asal Usul Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Penolakan Kawin Campur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isbat Nikah	0	8	11	2	5	1	3	1	0	4	10	7	5	57	40	5	1
Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wali Adhal	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1
Kewarisan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	0	2	0
Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hibah	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Wakaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Shodaqoh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penetapan Ahli Waris / Lain-Lain	1	0	3	2	2	2	2	1	0	1	0	1	0	14	14	3	0
Pengangkatan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Jumlah	11	177	131	105	105	73	143	95	112	101	118	114	66	1340	1220	69	23

Pada tahun 2020 tersisa sebanyak 11 perkara, kemudian pada tahun 2021 Pengadilan Agama Muara Enim menerima perkara sebanyak 1340 perkara, jumlah tersebut **menurun 5,5%** dibandingkan tahun 2020 yang menerima sebanyak 1.418 perkara, dengan demikian jumlah perkara tahun 2021 yang ditangani adalah sebanyak 1.351 perkara. Dari 1.351 perkara yang ditangani pada tahun 2021 tersebut, diputus sebanyak 1.328 perkara, jumlah tersebut **menurun 5,61%** dibandingkan tahun 2020 yang memutus sebanyak 1.407 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2021 adalah sebanyak 23 perkara lagi, jumlah tersebut sebesar **1,70%** dari jumlah perkara yang ditangani tahun 2021. Dengan demikian rasio produktivitas penyelesaian perkara adalah sebesar **98,3%**.

Keadaan Perkara Tingkat Banding

Keadaan perkara tingkat banding pada Pengadilan Agama Muara Enim berdasarkan alur perkara dan jenis perkara adalah sebagai berikut :

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Banding Pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2021

Alur Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa
Perdata Gugatan	3	4	7	4	2	1
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
Jumlah	3	4	7	4	2	1

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Agama Muara Enim Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa
Izin Poligami	0	0	0	0	0	0
Izin Kawin	0	0	0	0	0	0
Dispensasi Kawin	0	0	0	0	0	0
Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0
Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Kelalaian atas Kewajiban Sumai / Isteri	0	0	0	0	0	0
Cerai Talak	0	1	1	0	1	0
Cerai Gugat	3	0	3	3	0	0
Harta Bersama	0	2	2	1	1	0
Penguasaan Anak	0	0	0	0	0	0
Hadhonah	0	0	0	0	0	0
Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0
Hak-Hak Bekas Isteri	0	0	0	0	0	0
Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0
Perwalian	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0
Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0
Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0
Asal Usul Anak	0	0	0	0	0	0
Penolakan Kawin Campur	0	0	0	0	0	0
Isbat Nikah	0	0	0	0	0	0
Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0

Wali Adhal	0	0	0	0	0	0
Kewarisan	0	0	0	0	0	0
Wasiat	0	0	0	0	0	0
Hibah	0	1	0	0	0	1
Wakaf	0	0	0	0	0	0
Shodaqoh	0	0	0	0	0	0
Penetapan Ahli Waris / Lain-Lain	0	0	0	0	0	0
Pengangkatan Anak	0	0	0	0	0	0
Jumlah	3	4	7	4	2	1

Pada tahun 2020 tersisa sebanyak 3 perkara banding, kemudian pada tahun 2021 Pengadilan Agama Muara Enim menerima perkara banding sebanyak 4 perkara, jumlah tersebut **menurun 50%** dibandingkan tahun 2020 yang menerima sebanyak 8 perkara, sehingga jumlah perkara banding tahun 2021 yang ditangani adalah sebanyak 7 perkara. Dari 7 perkara banding yang ditangani pada tahun 2021 tersebut, diputus sebanyak 4 perkara, dan dicabut sebanyak 2 perkara, jumlah tersebut **menurun 33,3%** / **Tetap** dibandingkan tahun 2020 yang memutus sebanyak 6 perkara, sehingga sisa perkara banding tahun 2021 adalah sebanyak 1 perkara lagi, jumlah tersebut sebesar **14,2%** dari jumlah perkara banding yang ditangani tahun 2021. Dengan demikian rasio produktivitas penyelesaian perkara banding adalah sebesar **85,7%**.

Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Keadaan perkara tingkat kasasi pada Pengadilan Agama Muara Enim berdasarkan alur perkara dan jenis perkara adalah sebagai berikut :

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Kasasi Pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2021

Alur Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa
Perdata Gugatan	2	1	3	3	0	0
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
Jumlah	2	1	3	3	0	0

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Kasasi pada Pengadilan Agama Muara Enim Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa
Izin Poligami	0	0	0	0	0	0
Izin Kawin	0	0	0	0	0	0
Dispensasi Kawin	0	0	0	0	0	0
Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0
Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Kelalaian atas Kewajiban Sumai / Isteri	0	0	0	0	0	0
Cerai Talak	0	0	0	0	0	0
Cerai Gugat	1	1	2	2	0	0
Harta Bersama	0	0	0	0	0	0
Penguasaan Anak	0	0	0	0	0	0
Hadhonah	0	0	0	0	0	0
Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0
Hak-Hak Bekas Isteri	0	0	0	0	0	0
Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0
Perwalian	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0
Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0
Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0
Asal Usul Anak	0	0	0	0	0	0
Penolakan Kawin Campur	0	0	0	0	0	0
Isbat Nikah	0	0	0	0	0	0
Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0
Wali Adhal	0	0	0	0	0	0
Kewarisan	1	0	1	1	0	0
Wasiat	0	0	0	0	0	0
Hibah	0	0	0	0	0	0
Wakaf	0	0	0	0	0	0
Shodaqoh	0	0	0	0	0	0
Penetapan Ahli Waris / Lain-Lain	0	0	0	0	0	0
Pengangkatan Anak	0	0	0	0	0	0
Jumlah	2	1	3	3	0	0

Pada tahun 2020 tersisa sebanyak 2 perkara kasasi, kemudian pada tahun 2021 Pengadilan Agama Muara Enim menerima perkara kasasi

sebanyak 1 perkara, jumlah tersebut **menurun 50%** dibandingkan tahun 2020 yang menerima sebanyak 2 perkara, sehingga jumlah perkara kasasi tahun 2021 yang ditangani adalah sebanyak 3 perkara. Dari 3 perkara kasasi yang ditangani pada tahun 2021 tersebut, diputus sebanyak 3 perkara, jumlah tersebut **menaik 300%** dibandingkan tahun 2020 yang memutus sebanyak 0 perkara, sehingga sisa perkara kasasi tahun 2021 adalah sebanyak 0 perkara, jumlah tersebut sebesar **0%** dari jumlah perkara kasasi yang ditangani tahun 2021. Dengan demikian rasio produktivitas penyelesaian perkara kasasi adalah sebesar **100%**.

Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Keadaan perkara tingkat peninjauan kembali pada Pengadilan Agama Muara Enim berdasarkan alur perkara dan jenis perkara adalah sebagai berikut :

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali Pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2021

Alur Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa
Perdata Gugatan	0	0	0	0	0	0
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali pada Pengadilan Agama Muara Enim Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa
Izin Poligami	0	0	0	0	0	0
Izin Kawin	0	0	0	0	0	0
Dispensasi Kawin	0	0	0	0	0	0
Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0
Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Kelalaian atas Kewajiban Sumai / Isteri	0	0	0	0	0	0
Cerai Talak	0	0	0	0	0	0
Cerai Gugat	0	0	0	0	0	0
Harta Bersama	0	0	0	0	0	0

Penguasaan Anak	0	0	0	0	0	0
Hadhonah	0	0	0	0	0	0
Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0
Hak-Hak Bekas Isteri	0	0	0	0	0	0
Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0
Perwalian	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0
Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0
Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0
Asal Usul Anak	0	0	0	0	0	0
Penolakan Kawin Campur	0	0	0	0	0	0
Isbat Nikah	0	0	0	0	0	0
Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0
Wali Adhal	0	0	0	0	0	0
Kewarisan	0	0	0	0	0	0
Wasiat	0	0	0	0	0	0
Hibah	0	0	0	0	0	0
Wakaf	0	0	0	0	0	0
Shodaqoh	0	0	0	0	0	0
Penetapan Ahli Waris / Lain-Lain	0	0	0	0	0	0
Pengangkatan Anak	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0

Pada tahun 2020 tersisa sebanyak 0 perkara peninjauan kembali, kemudian pada tahun 2021 Pengadilan Agama Muara Enim menerima perkara peninjauan kembali sebanyak 0 perkara, , jumlah tersebut **Tetap** dibandingkan tahun 2020 yang menerima sebanyak 0 perkara, sehingga jumlah perkara peninjauan kembali tahun 2021 yang ditangani adalah sebanyak 0 perkara. Dari 0 perkara peninjauan kembali yang ditangani pada tahun 2020 tersebut, putus sebanyak 0 perkara, jumlah tersebut **Tetap** dibandingkan tahun 2020 yang memutus sebanyak 0 perkara, sehingga sisa perkara peninjauan kembali tahun 2021 adalah sebanyak 0 perkara lagi, jumlah tersebut sebesar **0%** dari jumlah perkara peninjauan kembali yang ditangani tahun 2021. Dengan demikian rasio produktivitas penyelesaian perkara peninjauan kembali adalah sebesar **0%**.

B. Penyelesaian Perkara

Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Keadaan sisa perkara tahun 2021 yang diputus pada Pengadilan Agama Muara Enim berdasarkan alur perkara dan jenis perkara adalah sebagai berikut :

Tabel Keadaan Sisa Perkara Tahun 2021 yang diputus pada Pengadilan Agama Muara Enim Berdasarkan Alur Perkara Tahun 2021

Alur Perkara	Sisa Perkara 2020	Di Putus 2021	Sisa Perkara 2021 Belum Putus
Perdata Gugatan	10	1034	21
Perdata Permohonan	1	294	2
Gugatan Sederhana	0	0	0
Jumlah	11	1328	23

Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Keadaan perkara tingkat pertama yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2021

Jenis Perkara	Waktu Penyelesaian Perkara (dalam bulan)			Jumlah	Belum Putus
	1 sd 3	3 sd 5	> 5		
Perdata Gugatan	1015	7	2	1024	21
Perdata permohonan	293	0	0	293	2
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0
Jumlah	1308	7	2	1317	23

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Keadaan perkara tingkat pertama yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Pertama yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Berdasarkan Alur Perkara Pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2021

Alur Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus	Mengajukan Banding	Tidak Mengajukan Banding
Perdata Gugatan	10				4	
Perdata Permohonan	1					
Gugatan Sederhana	0					
Jumlah	11					

Keadaan perkara tingkat banding yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Banding yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2021

Alur Perkara	Sisa Perkara Banding Th. 2020	Perkara Banding Th. 2021	Perkara Banding Ditangani	Di Putus Banding	Belum Putus Banding	Mengajukan Kasasi	Tidak Mengajukan Kasasi
Perdata Gugatan	3	4	7	6	1	1	6
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	3	4	7	6	1	1	6

Keadaan perkara tingkat kasasi yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Kasasi yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2021

Alur Perkara	Sisa Perkara Kasasi Th. 2020	Perkara Kasasi Th. 2021	Perkara Kasasi Ditangani	Di Putus Kasasi	Belum Putus Kasasi	Mengajukan Peninjauan Kembali	Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali
Perdata Gugatan	2	1	3	3	0	0	3
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	2	1	3	3	0	0	3

Catatan :

*) Pada tahun 2021 ada 1 perkara kasasi yang terdaftar dan 2 perkara kasasi tersisa pada tahun 2020, sehingga jumlah perkara kasasi yang ditangani pada tahun 2021 sebanyak 3 perkara. Dari 3 perkara kasasi tersebut pada tahun 2021 telah putus sebanyak 3 perkara, maka tidak ada perkara kasasi yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi

Penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Agama Muara Enim melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel Data Penyelesaian Perkara melalui Mediasi pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Gugatan 2021	Jumlah Perkara Gugatan Yang Di Mediasi	Status Keberhasilan Medias		
			Berhasil	Tidak Berhasi	Tidak Dapat Dilaksanakan
Perdata Gugatan	1045	96	3	93	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0
Jumlah	1045	96	3	93	0

Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

Penyelesaian perkara pidana anak pada Pengadilan Agama Muara Enim melalui diversi sebagaimana tabel berikut :

Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak melalui Diversi pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2021

Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status Keberhasilan Diversi		
		Berhasil	Tidak Berhasi	Tidak Dapat Dilaksanakan
0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Posbakum (Satker yang Mendapat Alokasi dan Realisasi Anggaran)

Untuk jasa konsultasi layanan bantuan hukum (Posbakum), Pengadilan Agama Muara Enim mendapat alokasi anggaran dalam DIPA tahun anggaran 2021, alokasi anggaran tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Anggaran tersebut diberikan negara untuk jasa konsultasi layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Muara Enim dengan volume 500 jam layanan pada tahun 2021.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021, anggaran sebesar Rp Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah terealisasi secara keseluruhan (**sebesar 100%**), dimana anggaran tersebut dapat memberikan jasa konsultasi layanan bantuan hukum sebanyak 500 jam layanan selama satu tahun dengan jumlah sebanyak 921 perkara.

Dari anggaran tersebut, Realisasi Volume Keluaran (RVK) telah sesuai dengan Target Volume Keluaran (TVK) yang ditetapkan sebanyak 500 jam layanan, dimana capain keluaran yang diperoleh pada tahun 2021 adalah sebesar **184,2%**, yang didapatkan dari rumus (921 jam layanan : 500 jam layanan x 100%).

Tabel Rekapulasi Jasa Konsultasi layanan Bantuan Hukum Tahun 2021

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Progres (%)	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK)	Progres (%)
Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama	50.000.000	50.000.000	100%	500	921	184,2%

Sidang Keliling

Untuk Sidang Keliling (sidang diluar gedung pengadilan), Pengadilan Agama Muara Enim mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) dalam DIPA tahun anggaran 2021. Anggaran tersebut diberikan negara untuk penyelesaian perkara diluar gedung Pengadilan dengan volume 50 perkara.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021, anggaran sebesar Rp 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) telah terealisasi secara keseluruhan (**sebesar 100%**), dimana anggaran tersebut dapat menyelesaikan sebanyak 54 perkara sidang keliling, dimana anggaran yang ditetapkan adalah untuk menyelesaikan sebanyak 50 Perkara.

Dengan demikian, Realisasi Volume Keluaran (RVK) telah mencapai Target Volume Keluaran (TVK) yang ditetapkan sebanyak 50 Perkara, dimana capain keluaran yang diperoleh pada tahun 2020 adalah sebesar **100%**, yang didapatkan dari rumus (50 perkara : 50 Perkara x 100%).

Tabel Rekapulasi Penyelesaian Perkara Sidang Keliling Tahun 2021

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Progres (%)	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK)	Progres (%)
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Diluar Gedung	50.400.000	50.400.000	100%	50	54	100%

Pelayanan Sidang Terpadu

Untuk Sidang Terpadu (pelayanan sidang terpadu), Pengadilan Agama Muara Enim mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam DIPA tahun anggaran 2021. Anggaran tersebut diberikan negara untuk penyelesaian perkara sidang terpadu dengan volume 690 perkara.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021, anggaran sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah terealisasi secara

keseluruhan (**sebesar 100%**), dimana anggaran tersebut hanya dapat digunakan menyelesaikan sebanyak 17 perkara sidang terpadu, sehubungan terkendala dengan situasi pandemi Covid-19 meskipun anggaran yang ditetapkan untuk menyelesaikan sebanyak 690 perkara.

Dengan demikian, Realisasi Volume Keluaran (RVK) kurang mencapai Target Volume Keluaran (TVK) yang ditetapkan sebanyak 690 Perkara, dimana capain keluaran yang diperoleh pada tahun 2021 adalah sebesar **2,46%**, yang didapatkan dari rumus (17 perkara : 690 Perkara x 100%).

Tabel Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Sidang Terpadu Tahun 2021

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Progres (%)	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK)	Progres (%)
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu	25.000.000	25.000.000	100%	690	17	2,46%

Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Untuk Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara), Pengadilan Agama Muara Enim mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 14.250.000,- (empat Belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam DIPA tahun anggaran 2020. Anggaran tersebut diberikan negara untuk bantuan pembebasan biaya perkara dengan volume 30 perkara.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021, anggaran sebesar Rp 14.250.000,- (empat Belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah telah terealisasi secara keseluruhan (**sebesar 100%**), dimana anggaran tersebut dapat menyelesaikan sebanyak 27 perkara prodeo.

Dengan demikian, Realisasi Volume Keluaran (RVK) telah sesuai dengan Target Volume Keluaran (TVK) yang ditetapkan sebanyak sebanyak 30 Perkara, dimana capain keluaran yang diperoleh pada tahun 2021 adalah sebesar **90%**, yang didapatkan dari rumus (27 perkara : 30 Perkara x 100%).

Tabel Rekapulasi Penyelesaian Perkara Prodeo Tahun 2021

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Progres (%)	Target Volume Keluaran (TK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK)	Progres (%)
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	14.250.00	14.250.00	100%	30	27	90%

Bab III

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia sebagai salah satu unsur pokok dalam kegiatan manajemen dan merupakan bagian yang dapat menggerakkan roda administrasi untuk pemberian dukungan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan. Sumber Daya manusia terdiri dari Teknis Yudisial dan Non Teknis berjumlah sebanyak 18 orang/personil dengan rincian sebagai berikut :

1. Sumberdaya Manusia Teknis Yudisial

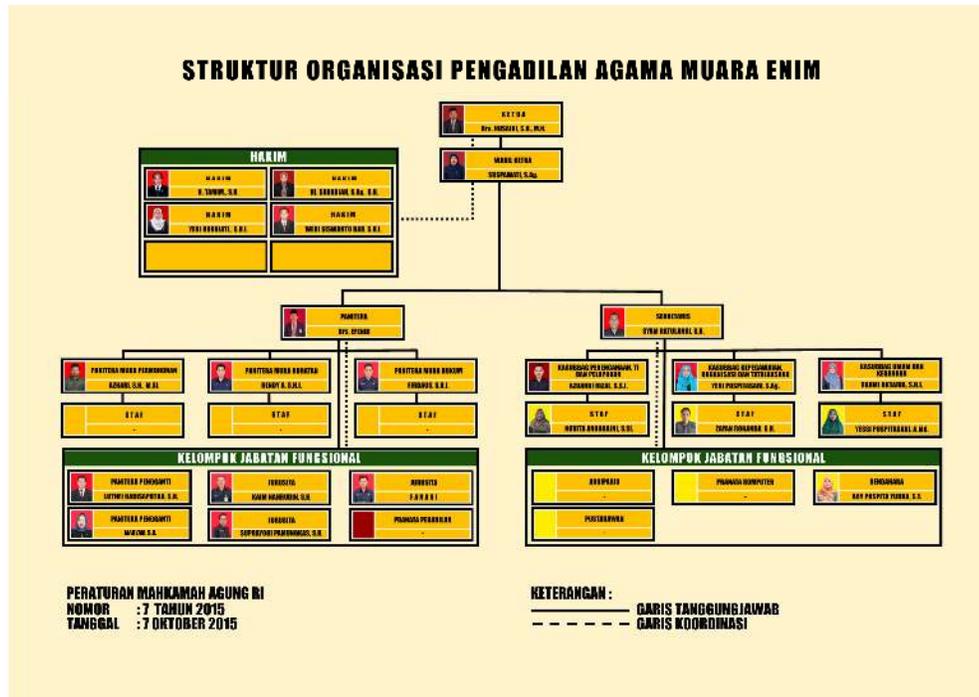
- Ketua : 1 orang
- Wakil Ketua : 1 orang
- Hakim : 4 orang
- Panitera : 1 orang
- Panitera Muda : 3 orang
- Panitera Pengganti : 2 orang
- Jurusita : 3 orang
- Jurusita Pengganti : - orang

2. Sumberdaya Manusia Non Teknis Yudisial.

- Sekretaris : 1 orang
- Kepala Sub Bagian : 3 orang
- Staf/Pelaksana/Fungsional : 4 orang

Adapun SDM Teknis Yudisial dan Non Teknis Pengadilan Agama Muara Enim sesuai dengan bagan struktur organisasi dapat dilihat sebagaimana dibawah ini :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/ Pendidikan

Sesuai struktur organisasi, sumber daya manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan Agama Muara Enim terdiri dari 15 orang tenaga teknis dan 8 orang tenaga non teknis, yang seluruhnya berjumlah sebanyak 23 orang. Adapun komposisi SDM tersebut diuraikan sebagaimana berikut ini :

Tabel Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan/Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

Nama Pegawai	Jabatan Terakhir	TMT Jabatan	Pangkat	Golongan Ruang	Pendidikan
Drs. Husaini, S.H., M.H.	Ketua Hakim Madya Utama	18-08-2020	Pembina Utama Muda	IV/c	S-2 Program Studi Ilmu Hukum
Susprawati, S.Ag.	Wakil Ketua Hakim Madya Muda	25-07-2021	Pembina	IV/a	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
H. Tamim, S.H.	Hakim Madya Utama	09-06-2018	Pembina Utama Muda	IV/c	S-1 Program Studi Ilmu Hukum

Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.	Hakim Madya Muda	25-04-2019	Pembina Tingkat I	IV/c	S-1 Program Studi Ilmu Hukum
Yeni Kurniati, S.H.I.	Hakim Pratama Utama	19-11-2020	Penata Tingkat I	III/d	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Weri Siswanto BAD, S.H.I.	Hakim Pratama Madya	17-12-2018	Penata	III/c	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Drs. Efendi	Panitera	05-07-2021	Pembina	IV/a	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Syam Ratulangi, S.H.	Sekretaris	01-12-2018	Pembina	IV/a	S-1 Program Studi Ilmu Hukum
Rendy A, S.H.I.	Panitera Muda Gugatan	23-01-2017	Penata	III/c	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Firdaus, S.H.I.	Panitera Muda Hukum	30-03-2020	Penata	III/c	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Azhari, S.H., M.Si.	Panitera Muda Permohonan	05-07-2021	Penata Tingkat I	III/d	S-2 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Luthfi Hadisaputra, S.H.I.	Panitera Pengganti	15-06-2021	Penata	III/c	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Maryam, S.H.	Panitera Pengganti	06-10-2021	Penata Muda Tingkat I	III/b	S-1 Program Studi Ilmu Hukum
Yeni Puspita, S.Ag.	Kepala Sub Bagian kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	06-03-2017	Penata Tingkat I	III/d	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Rahmi Oktaria, S.H.I.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	06-03-2017	Penata	III/c	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Azuardi Rizal, S.S.I.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	29-03-2019	Penata	III/c	S-1 Program Studi Ilmu Komputer
Kaim Nahrudin, S.H.	Jurusita	30-03-2020	Penata Tingkat I	III/d	S-1 Program Studi Ilmu Hukum
Fanani	Jurusita	21-06-2015	Penata Muda Tingkat I	III/b	SMA

Suprayogi Pamungkas, S.H.	Jurusita	30-03-2020	Penata Muda	III/a	S-1 Program Studi Ilmu Hukum
Zayan Rohanda, S.H.	Staf Pelaksana	07-08-2019	Penata	III/d	S-1 Program Studi Ilmu Hukum
Ary Puspita Yudha, S.T.	Staf Pelaksana	30-12-2015	Penata Muda Tingkat I	III/b	S-1 Program Studi Ilmu Komputer
Novita Anggraini, S.Si	Staf Pelaksana	01-02-2021	Penata Muda	III/a	S-1 Program Studi Ilmu Komputer
Yessi Puspitasari, A.Md	Staf Pelaksana	01-02-2021	Pengatur	II/c	D-III Program Studi Perpustakaan

Dari 23 orang SDM yang ada tersebut, sebanyak 2 orang merupakan golongan III/a (Penata Muda), jumlah tersebut sebesar 8,7% dari jumlah SDM. Sebanyak 3 orang merupakan golongan III/b (Penata Muda Tk.I) sebesar 13,04% dari jumlah SDM. Sebanyak 1 orang merupakan golongan II/c (Pengatur), jumlah tersebut sebesar 4,34% dari jumlah SDM. Sebanyak 6 orang merupakan golongan III/c (Penata), jumlah tersebut sebesar 26,08% dari jumlah SDM. Sebanyak 5 orang merupakan golongan III/d (Penata Tingkat I), jumlah tersebut sebesar 21,7% dari jumlah SDM. Sebanyak 3 orang merupakan golongan IV/a (Pembina), jumlah tersebut sebesar 13,04% dari jumlah SDM. Sebanyak 3 orang merupakan golongan IV/c (Pembina Utama Muda), jumlah tersebut sebesar 13,04% dari jumlah SDM. Adapun komposisi SDM tersebut diuraikan sebagaimana berikut ini :

Tabel Komposisi SDM Berdasarkan Pangkat /Golongan

Jenjang Golongan Ruang	Jumlah	Komposisi
IV/e	0	0%
IV/d	0	0%
IV/c	3	13,04%
IV/b	0	11,11%
IV/a	3	13,04%
III/d	5	21,7%
III/c	6	26,08%
III/b	3	13,04%

III/a	2	8,7%
II/d	0	0%
II/c	1	4,34%
II/a	0	0%
Jumlah	23	100%

Dari 23 orang SDM yang ada tersebut, sebanyak 1 orang memiliki jenjang pendidikan tingkat SMA, jumlah tersebut hanya 4,34% dari jumlah SDM yang ada saat ini. 1 orang memiliki jenjang D-III jumlah tersebut hanya 4,34% dari jumlah SDM saat ini. Sedangkan yang memiliki jenjang pendidikan tingkat S-1 jumlahnya sebanyak 19 orang, dimana jumlah tersebut mencapai 82,6% dari jumlah SDM. Kemudian untuk jenjang pendidikan tingkat S-2 adalah sisanya sebanyak 2 orang, jumlah tersebut hanya 8,7% dari jumlah SDM. Adapun komposisi SDM tersebut diuraikan sebagaimana berikut ini :

Tabel Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Komposisi
S-3	0	0 %
S-2	2	8,7 %
S-1 / D-IV	19	82,2 %
D-III	1	4,34 %
D-II	0	0 %
D-I	0	0 %
SMA	1	4,34 %
SMP	0	0 %
Jumlah	23	100 %

Mutasi

Mutasi bagi Pegawai Negeri dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil. Selama tahun 2021 SDM Pengadilan Agama Muara Enim mendapat mutasi sebagai berikut :

Tabel Mutasi dan Promosi Hakim Tahun 2021

Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
Isrizal Anwar S.Ag., M.Hum	Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB	Rapim 22 Juni 2021
Suspawati, S.Ag	Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo Kelas II	Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Rapim 22 Juni 2021

Promosi

Tabel Promosi Pejabat Fungsional Tahun 2021

Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
Drs. Efendi	Panitera Pengadilan Agama Baturaja Kelas IB	Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Rapim 17 Mei 2021
Azhari, S.H, M.Si	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palembang Kelas IA	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Rapim 17 Mei 2021
Luthfi Hadisaputra, S.H	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pagaram Kelas II	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Rapim 17 Mei 2021

Tabel Promosi Pejabat Struktural Tahun 2021

Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
-	-	-	-

Pindah Tugas

Tabel Pindah Tugas Pegawai Tahun 2021

Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
-	-	-	-

Pensiun

Tabel Pensiun Pegawai Tahun 2021

Nama	Pangkat / Golongan	Jabatan	TMT Pensiun	Status Pensiun
-	-	-	-	-

Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang Telah Mengikuti Diklat)

Pembinaan SDM terhadap tenaga teknis yustisial yang terdiri hakim dan panitera serta jurusita dengan mengikuti pendalaman materi hukum formil dan materil. Adapun data pelatihan dan pembinaan sebagai berikut :

Tabel Diklat Tenaga Teknis Tahun 2021

Nama	Jabatan	Nama Kegiatan	Penyelenggara Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
Kaim Nahrudin, S.H	Jurusita	Pelatihan Teknis Yudisial Jurusita/Jurusita Pengganti Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia	Balitbang Diklat Kundil MA RI	26 Juli s.d 30 Juli 2021 dan 2 Agustus s.d 6 Agustus 2021
Drs. Efendi	Panitera	Pelatihan Sertifikasi Mediator Gelombang 4 bagi Hakim dan Panitera lingkungan Peradilan Agama seluruh Indonesia	Balitbang Diklat Kundil MA RI	23 Agustus s.d 3 September 2021 dan 6 September s.d 22 Desember 2021
Azhari, S.H, M.Si	Panitera Muda Permohonan	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti Tingkat Pertama Gel. 2 Peradilan Agama seluruh Indonesia	Balitbang Diklat Kundil MA RI	16 s.d 22 November 2021 dan 23 November s.d 2 Desember 2021
Firdaus, S.H.I	Panitera Muda Permohonan	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti Tingkat Pertama Gel. 2 Peradilan Agama seluruh Indonesia	Balitbang Diklat Kundil MA RI	16 s.d 22 November 2021 dan 23 November s.d 2 Desember 2021
Rendy A, S.H.I	Panitera Muda Permohonan	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti Tingkat Pertama Gel. 2 Peradilan Agama seluruh Indonesia	Balitbang Diklat Kundil MA RI	16 s.d 22 November 2021 dan 23 November s.d 2 Desember 2021
Luthfi Hadisaputra, S.H	Panitera Muda Permohonan	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti Tingkat Pertama Gel. 2 Peradilan Agama seluruh Indonesia	Balitbang Diklat Kundil MA RI	16 s.d 22 November 2021 dan 23 November s.d 2 Desember 2021

Tabel Diklat Tenaga Non Teknis Tahun 2021

Nama	Jabatan	Nama Kegiatan	Penyelenggara Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
Novita Anggraini, S.Si	Pranata Komputer Pratama	Latsar CPNS Mahkamah Agung Tahun 2021	Pusdiklat Menpim Balitbang Diklat Kundil MA RI	15 Maret s/d 19 Juli 2021
Yessi Puspitasari, Amd.	Pelaksana terampil Arsiparis	Latsar CPNS Mahkamah Agung Tahun 2021	Pusdiklat Menpim Balitbang Diklat Kundil MA RI	1 Juli s/d 14 Oktober 2021

Bab IV

Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi

A. Pengelolaan Keuangan

Alokasi anggaran Pengadilan Agama Muara Enim memiliki dua macam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yakni DIPA unit organisasi pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dengan Nomor SP DIPA- 005.01.2.402282/2021, dan DIPA unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor SP DIPA- 005.04.2.402283/2021. DIPA tersebut disahkan pada tanggal 23 November 2020

Tabel DIPA 01 Tahun Anggaran 2021

Program	Kegiatan	Output	Anggaran	Volume Keluaran
005.01. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1066. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1066.EAA. 001 . Layanan Perkantoran 001 Gaji dan Tunjangan	3.338.631.000	1 Layanan
005.01. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1066. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1066.EAA. 001 . Layanan Perkantoran 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.087.633.000	1 Layanan
005.01. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1066. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1066.EAC. 003 . Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan 052 Non Operasional Satuan Daerah	5.000.000	1 Layanan
005.01. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1066. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1071.EAD.001 Layanan Sarana Internal 052 Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi	37.500.000	1 Layanan
Jumlah			4.468.764.000	

Tabel DIPA 04 Tahun Anggaran 2021

Program	Kegiatan	Output	Anggaran	Volume Keluaran
005.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053 Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1053.QBA.001 Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara	14.250.000	30 Perkara
005.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053 Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1053.QBA.002 Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung	50.400.000	24 Kegiatan
005.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053 Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1053.QBA.003 Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	50.000.000	500 Jam Layanan
005.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053 Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1053.QBA.004 Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu	25.000.000	4 Kegiatan
Jumlah			139.650.000	

REVISI ANGGARAN

Tabel Revisi Ke-1 DIPA 01 Tahun Anggaran 2021 (03 Maret 2021)

Kode	Uraian	Semula	Menjadi	Selisih
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp 4.456.716.000	Rp 4.456.716.000	Rp -
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 4.419.216.000	Rp 4.419.216.000	
1066.EAA	Layanan Perkantoran	Rp 4.414.216.000	Rp 4.414.216.000	Rp -
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 1.075.585.000	Rp 1.075.585.000	Rp -
A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	Rp 342.515.000	Rp 339.515.000	Rp (3.000.000)
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 266.570.000	Rp 263.570.000	Rp (3.000.000)
	- Langganan Surat Kabar/Berita/Majalah	Rp 6.300.000	Rp 3.300.000	Rp (3.000.000)
J	Penanggulangan Bencana Covid	Rp -	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
521131	Belanja Operasional Penanganan Pandemi	Rp -	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
	-Masker/Handsanitezer/sarung tangan/ thermometer	Rp -	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000

Tabel Revisi Ke-2 DIPA 01 Tahun Anggaran 2021 (16 April 2021)

Revisi hanya dilakukan pada Halaman III DIPA, yakni rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan.

Tabel Revisi Ke-3 DIPA 01 Tahun Anggaran 2021 (09 Agustus 2021)

Kode	Uraian	Semula	Menjadi	Selisih
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp 4.456.716.000	Rp 4.456.716.000	Rp -
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 4.419.216.000	Rp 4.419.216.000	
1066.EAA	Layanan Perkantoran	Rp 4.414.216.000	Rp 4.414.216.000	Rp -
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 1.075.585.000	Rp 1.075.585.000	Rp -
B	Langganan Daya dan Jasa	Rp 397.978.000	Rp 394.978.000	Rp (3.000.000)
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 171.000.000	Rp 168.000.000	Rp (3.000.000)
J	Penanggulangan Bencana Covid	Rp 3.000.000	Rp 6.000.000	Rp 3.000.000
521131	Belanja Operasional Penanganan Pandemi	Rp 3.000.000	Rp 6.000.000	Rp 3.000.000

Tabel Revisi Ke-4 DIPA 01 Tahun Anggaran 2021 (8 Oktober 2021)

Revisi hanya dilakukan pada Halaman III DIPA, yakni rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan.

Tabel Revisi Ke-5 DIPA 01 Tahun Anggaran 2021 (2 November 2021)

Kode	Uraian	Semula	Menjadi	Selisih
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp 4.456.716.000	Rp 4.456.716.000	Rp -
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 4.419.216.000	Rp 4.419.216.000	Rp -
1066.EAA	Layanan Perkantoran	Rp 4.414.216.000	Rp 4.414.216.000	Rp -
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 1.075.585.000	Rp 1.075.585.000	Rp -
A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	Rp 339.515.000	Rp 347.435.000	Rp 7.920.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp 15.000.000	Rp 22.920.000	Rp 7.920.000
B	Langganan Daya dan Jasa	Rp 394.978.000	Rp 352.858.000	Rp (42.120.000)
522111	Belanja Langganan Listrik	Rp 101.980.000	Rp 63.720.000	Rp (38.260.000)

522112	Belanja Langganan Telepon	Rp 21.200.000	Rp 17.340.000	Rp (3.860.000)
C	Pemeliharaan Kantor	Rp 255.772.000	Rp 289.972.000	Rp 34.200.000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 126.720.000	Rp 149.420.000	Rp 22.700.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 120.052.000	Rp 131.552.000	Rp 11.500.000

Tabel Revisi Ke- 6 DIPA 01 Tahun Anggaran 2021 (15 November 2021)

Kode	Uraian	Semula	Menjadi	Selisih
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp 4.456.716.000	Rp 4.468.764.000	Rp 12.048.000
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 4.419.216.000	Rp 4.431.264.000	Rp 12.048.000
1066.EAA	Layanan Perkantoran	Rp 4.414.216.000	Rp 4.426.264.000	Rp 12.048.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 1.075.585.000	Rp 1.087.633.000	Rp 12.048.000
D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	Rp 45.720.000	Rp 57.768.000	Rp 12.048.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp -	Rp 12.048.000	Rp 12.048.000

Tabel Revisi Ke- 7 DIPA 01 Tahun Anggaran 2021 (30 November 2021)

Kode	Uraian	Semula	Menjadi	Selisih
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp 4.468.764.000	Rp 4.468.764.000	Rp -
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 4.431.264.000	Rp 4.431.264.000	Rp -
1066.EAA	Layanan Perkantoran	Rp 4.431.264.000	Rp 4.431.264.000	Rp -
001	Gaji dan Tunjangan	Rp 3.338.631.000	Rp 3.338.631.000	Rp -
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 888.536.000	Rp 1.088.536.000	Rp 200.000.000
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	Rp 77.279.000	Rp 90.279.000	Rp 13.000.000
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	Rp 23.646.000	Rp 23.846.000	Rp 200.000
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	Rp 36.400.000	Rp 42.400.000	Rp 6.000.000
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp 1.724.380.000	Rp 1.524.380.000	Rp (200.000.000)
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	Rp 303.557.000	Rp 283.357.000	Rp (20.200.000)
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp 60.466.000	Rp 61.466.000	Rp 1.000.000

REALISASI ANGGARAN

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Barang Operasional DIPA 01 Tahun Anggaran 2021

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Sisa
Belanja Keperluan Perkantoran	431.570.000	431.134.780	99,90%	435.220	0,1%
Belanja Pengiriman Surat Dinas	3.000.000	2.019.960	67,33%	980.040	32,67%
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	45.720.000	45.720.000	100,00%	-	0,00%
Belanja Barang Operasional Lainnya	34.968.000	34.965.121	99,99%	2.879	0,01%
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60.945.000	60.945.000	100,00%	-	0,00%
Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi covid 19	6.000.000	6.000.000	100,00%	-	0,00%
Belanja Langganan Listrik	63.720.000	62.244.589	97,68%	1.475.411	2,32%
Belanja Langganan Telepon/Internet	17.340.000	17.312.777	99,84%	27.223	0,16%
Belanja Langganan Air	25.198.000	25.106.000	99,63%	92.000	0,37%
Belanja Sewa Rumah Dinas Hakin	75.600.000	75.600.000	100,00%	-	0,00%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	149.420.000	149.413.940	99,99%	6.060	0,01%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	9.000.000	9.000.000	100,00%	-	0,00%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	131.552.000	131.552.000	100,00%	-	0,00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.600.000	33.502.450	99,71%	97.550	0,29%
Jumlah	1.087.633.000	1.084.516.617	99,71%	3.116.383	0,29%

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Barang Non Operasional DIPA 01 Tahun Anggaran 2021

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Sisa
Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi Covid 19	5.000.000	4.993.000	99,86%	7.000	0,14%
Jumlah	5.000.000	4.993.000	99,86%	7.000	0,14%

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Pegawai DIPA 01 Tahun Anggaran 2021

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Sisa
Belanja Gaji Pokok PNS	1.088.536.000	1.061.228.280	97,50%	27.307.720	2,50%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.000	14.424	75,92%	4.576	24,08%
Belanja Tunjangan Suami/ Istri PNS	90.279.000	88.943.862	98,52%	1.335.138	1,47%
Belanja Tunjangan Anak PNS	23.846.000	23.675.362	99,29%	170.638	0,71%
Belanja Tunjangan Struktural PNS	42.400.000	41.300.000	97,41%	1.100.000	2,59%
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.524.380.000	1.333.420.000	87,35%	192.860.000	12,65%
Belanja Tunjangan PPh PNS	283.357.000	165.194.967	58,30%	118.162.033	41,70%
Belanja Tunjangan Beras PNS	61.466.000	60.977.640	99,21%	488.360	0,79%

Belanja Uang Makan PNS	211.992.000	166.061.000	78,33%	45.931.000	21,66%
Belanja Tunjangan Umum PNS	12.356.000	9.925.000	80,33%	2.431.000	19,67%
Jumlah	3.338.631.000	2.950.740.535	88,39%	387.890.465	11,61%

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Modal DIPA 01 Tahun Anggaran 2021

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Sisa
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.500.000	37.500.000	100,00%	0	0%
Jumlah	37.500.000	37.500.000	100,00%	0	0%

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA 04 Tahun Anggaran 2021

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Sisa
Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Prodeo)	14.250.000	12.825.000	90,00 %	1.425.000	10,00%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Sidang Keliling)	50.400.000	50.400.000	100%	-	0%
Belanja Jasa Konsultan (Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama)	50.000.000	50.000.000	100%	-	0%
Beban Perjalan Dinas Dalam Kota (Sidang Terpadu)	25.000.000	25.000.000	100%	-	0%
Jumlah	139.650.000	138.225.000	98,98%	1.425.000	1,02%

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Tabel PNBP 402282 (01) Tahun Anggaran 2021

Kode	Uraian Jenis Pendapatan	Realisasi pendapatan
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	659.124
	Jumlah	659.124

Tabel PNBP 402283 (04) Tahun Anggaran 2021

Kode	Uraian Jenis Pendapatan	Realisasi pendapatan
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	40.495.000
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	70.161.400
	Jumlah	110.656.400

PENGELOLAAN BIAYA PERKARA

Tabel Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
Saldo Awal	60.981.500	-
Penerimaan	1.866.577.700	
Biaya Proses/ATK/Pemberkasan*)		67.650.000
Biaya Panggilan		704.506.000
Biaya Penerjemah		-
Biaya Pemberitahuan		189.321.000
Biaya Sita		2.785.000
Biaya Pemeriksaan Setempat		7.700.000
Biaya Sumpah		-
Biaya Saksi Ahli		-
Biaya Pengiriman		1.200.000
Biaya Materai		13.091.000
PNBP Biaya Pendaftaran		40.475.000
PNBP Redaksi		13.280.000
PNBP Lain-lain		33.710.000
Pengembalian Sisa Panjar		785.035.200
Biaya Lain-lain		300.000
Jumlah	1.927.559.200	1.858.553.200
Saldo Akhir	69.006.000	
Saldo di Bank	43.653.081	
Saldo di Brankas	25.352.919	

Tabel Biaya Proses/ATK/Pemberkasan

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Saldo Awal	4.201.500		
Penerimaan	67.000.000		
Pengeluaran		68.502.000	
Saldo Akhir			
Jumlah	71.201.500	68.502.000	2.699.500

Tabel Biaya Sita Jaminan/Eksekusi/Lelang

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Saldo Awal	5.401.000		
Penerimaan			
Biaya Materai		5.000	
Biaya Leges			

Biaya Sita Eksekusi			
Biaya Juru Sita			
Biaya Pengumuman Lelang/Iklan			
Biaya Juru Lelang			
Biaya Lelang			
Biaya Saksi		400.000	
Biaya Pemberitahuan		1.575.000	
Biaya Keamanan			
Pengembalian Sisa Panjar Eksekusi		186.000	
PNBP		55.000	
Lain-lain		3.176.000	
Jumlah	5.401.000	5.401.000	0
Saldo Akhir	0	0	0

Tabel Biaya Sita Jaminan/Eksekusi/Lelang

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Saldo Awal			
Penerimaan (Uang Konsinyasi dan Panjar Konsinyasi)			
Biaya Pelaksanaan Penawaran			
Biaya pendaftaran			
Biaya Proses/ATK			
Redaksi			
Materai			
Leges			
Pengambilan Uang Konsinyasi			
Biaya Lain-lain			
Jumlah			
Saldo Akhir	0	0	0

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Gedung

Dalam pembangunan gedung Kantor Pengadilan tidak boleh mengesampingkanciri khas dari pada gedung kantor yang ada pada bagian depan mempunyai 4 (empat) pilar/ tiang kokoh berdiri tegak menunjukkan kewibawaan, Pengadilan Tingkat Pertama/ Pengadilan

Tingkat Banding tempat para Hakim menegakkan hukum dan keadilan merupakan tempat yang terhormat yang harus di jaga kewibawaannya. Oleh karena itu peradilan harus dijaga kehormatan dan kewibawaannya, untuk mencapai derajat ini maka aparat peradilan, Hakim khususnya harus memiliki integritas moral yang tinggi dan tiada cacat celanya dan harus memiliki pula kemampuan profesional yang dapat diandalkan serta kematangan ilmu intelektual dapat diteladani oleh masyarakat luas.

Disamping itu 4 (Empat) pilar juga mengandung azas proses peradilan yaitu: cepat, sederhana, biaya ringan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Yang dicita-citakan oleh Undang-undang. Pengadilan Agama Muara Enim yang berkedudukan di Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H., Nomor 1, Desa Kepur, Muara Enim dengan luas bangunan 1.400 M² yang terdiri dari 2 (dua) lantai.

Tabel Sarana dan Prasarana Gedung Pengadilan Agama Muara Enim

Sarana / Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
Ruang Ketua	1	Lantai II
Ruang Wakil Ketua	1	Lantai II
Ruang Hakim	1	Lantai II
Ruang Panitera	1	Lantai II
Ruang Sekretaris	1	Lantai II
Ruang Rapat	1	Lantai II
Ruang Pertemuan	1	Lantai I
Ruang Sidang	2	Lantai I
Ruang Kepaniteraan (PP dan JS)	1	Lantai I
Ruang Panmud Hukum	1	Lantai I
Ruang Kesekretariatan	1	Lantai I
Ruang Bendahara	1	Lantai I
Ruang Server IT	1	Lantai I
Ruang Panel	1	Lantai I
Ruang Mediasi	1	Lantai I
Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Lantai I
Ruang Tunggu Sidang	1	Lantai I
Ruang Bermain Anak	1	Lantai I
Ruang Laktasi	1	Lantai I

Ruang Medis	1	Lantai I
Ruang Perpustakaan	1	Lantai II
Mushola	1	Lantai I
Gudang	2	Lantai 1 dan Lantai II
Ruang Arsip Perkara	2	Lantai 1 dan Lantai II
Ruang Tunggu Advocad	1	Lantai I
Toilet Wanita	3	Lantai I
Toilet Pria	2	Lantai I
Pos Satpam	2	Lantai I

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Muara Enim mendapatkan anggaran diperuntukkan pemeliharaan gedung kantor, dan halaman kantor sebesar Rp. 149.420.000,- (*seratus empat puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh rupiah*), dengan realisasi sebesar 100,00 %. Sedangkan untuk Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya (pemeliharaan Rumah Dinas) sebesar Rp 9.000.000,- (*Sembilan juta rupiah*) dengan realisasi sebesar 100,00%.

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Sisa
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	149.420.000	149.420.000	100,00%	0	0,00%
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	9.000.000	9.000.000	100,00%	0	0,00%

Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Pengadilan Agama Muara Enim memiliki sarana dan prasarana fasilitas gedung berupa diantaranya sebagai berikut :

Tabel Sarana/Prasarana Fasilitas Gedung

Sarana / Prasarana Fasilitas Gedung	Jumlah	Keterangan
Komputer/ Personal Computer	16	Kondisi Baik
Laptop	14	Kondisi Baik
Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	Kondisi Baik
Ac	8	Kondisi Baik
PABX	1	Kondisi Baik

Scanner	1	Kondisi Baik
Faximile	1	Kondisi Baik
Mesin Finger	1	Kondisi Baik
CCTV	10	Kondisi Baik
Numerator	1	Kondisi Rusak Berat
Brandkas	1	Kondisi Baik
Filling Cabinet Besi	2	Kondisi Rusak Ringan
Sice	6	Kondisi Baik 4, Rusak Ringan 2
Papan Visual/ Papan Nama	6	Kondisi Baik
Lemari Besi/ Metal	9	Kondisi Baik
Meja Kerja Kayu	100	80 Kondisi Baik, 20 Kondisi Rusak Berat
Kursi Besi/ Metal	198	172 Kondisi Baik, 26 Kondisi Rusak Berat
Kursi Panjang Besi/Metal	17	16 Kondisi Baik, 1 Kondisi Rusak Berat
Kursi Kayu	59	50 Kondisi Baik, 9 Kondisi Rusak Berat
UPS	6	3 Kondisi Baik, 3 rusak berat
Lemari Kayu	7	Kondisi Baik
Server	2	Kondisi Baik
Rak Server	1	Kondisi Baik

Pengadaan

Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2021 ada belanja modal sebesar **Rp 37.500.000,-** (*Tiga Puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), untuk pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi berupa Dekstop PC sebanyak 3 unit.

Pemeliharaan

Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kantor selama satu tahun anggaran 2021 berupa pemeliharaan peralatan dan mesin meliputi perawatan kendaraan roda 4 dan roda 2, pcdesktop, laptop, printer, ac, dan inventaris lainnya senilai **Rp 131.552.000,-** (*seratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah*).

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Sisa
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	131.552.000	131.552.000	100%	1.485	0%

Penghapusan

Pengadilan Agama Muara Enim saat ini sedang mengajukan proses Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan Mesin dan Meubelair, dan sudah dalam tahapan penjualan BMN dengan metode lelang closed bidding, menunggu diterbitkan Risalah Lelang dari KPKNL Lahat.

Kendaraan Dinas

Hingga akhir tahun 2021 jumlah kendaraan dinas yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Muara Enim yaitu :

Tabel Daftar Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Muara Enim

Nama Kendaraan Dinas	Tahun Perolehan	Kondisi	Keterangan
Toyota Innova Type E Bensin	2010	Rusak Ringan	MA Dropping Mobil Operasional Panitera
Toyota Innova Type G Bensin	2011	Baik	Pinjam Pakai dari Pemkab Muara Enim Mobil Operasional Sekretaris
Mitsubishi Pajero Solar	2011	Baik	Pinjam Pakai dari Pemkab Muara Enim Mobil Operasional Ketua
Toyota Kijang Standar KF80	2003	Rusak Ringan	Pinjam Pakai dari Pemkab Muara Enim Mobil Operasional Kantor
Honda Mega Pro	2006	Rusak Ringan	Motor Operasional Dinas Jabatan
Honda Mega Pro	2006	Rusak Ringan	Motor Operasional Dinas Jabatan
Supra X 125	2008	Rusak Ringan	Motor Operasional Dinas Jabatan
Supra X 125	2006	Rusak Ringan	Motor Operasional Dinas Jabatan

Rumah Dinas

Hingga akhir tahun 2021 jumlah rumah dinas yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Muara Enim yaitu :

Tabel Daftar Rumah Dinas

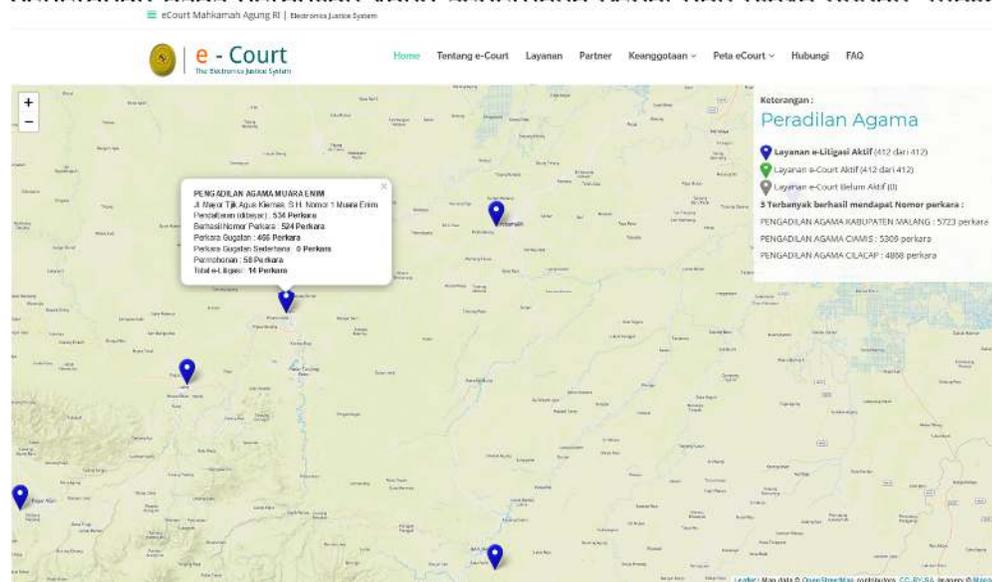
Nama Rumah Dinas	Tahun	Kondisi	Keterangan
Rumah Dinas Ketua	2014	Baik	Pinjam Pakai dari Pemkab Muara Enim
Rumah Negara Gol. II Type B Permanen	2009	Baik	Milik Pengadilan Agama Muara Enim

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Muara Enim

Gambar Peta Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020

Sejak Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 5610/DJA/HM.02.3/XI/2019 tanggal 26 November 2019, tentang Implementasi e-litigation di lingkungan peradilan agama, sebagai neneranan asas neradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan maka



kongkrit dari tanggal 24 Desember 2019 dan sudah menerima/memproses dan memutus perkara e-court secara biasa maupun e-litigation, serta telah melaporkannya ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk direkap dan di laporkan ke Direktorat Jenderal Badan peradilan Agama. Secara keseluruhan perkara yang diajukan melalui e-court adalah sebanyak 283 perkara, sedangkan yang bisa terdaftar di Pengadilan Agama Muara Enim berjumlah 277 perkara, yakni gugatan sebanyak 245 perkara, permohonan sebanyak 32 perkara dan gugatan sederhana sebanyak 0 perkara.

Pengadilan Agama Muara Enim pada tahun 2021 telah mendapatkan Anugerah Mahkamah Agung Republik Indonesia Sebagai Pengadilan

Terbaik Peringkat VIII Dalam Pelaksanaan E-Court Pada Kategori Peradilan Agama Kelas IB.



Implementasi e-court di Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2021 adalah dengan lampiran sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Daftar Perkara E-Court Tahun 2021

Uraian	Terdaftar	Dicabut	Putus Secara Elektronik	Putus Secara Biasa	Jumlah Putus	Sisa / Masih Dalam proses
Gugatan Online	245	7	7	238	243	2
Permohonan Online	32	4	0	32	32	0
Gugatan Sederhana Online	0	0	0	0	0	0
Jumlah	277	11	7	270	275	2

Implementasi SIPP di Pengadilan Agama Muara Enim

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Muara Enim berhasil memutus sebanyak 1.328 perkara. Jumlah tersebut mencapai **99,22%** dari jumlah beban perkara yang ditangani tahun 2021, yakni 11 perkara sisa tahun 2021 ditambah 1.340 perkara diterima tahun 2021. Hasil tersebut sudah melebihi batas maksimal target sisa perkara sebesar 10%.

Gambar Screen Shoot SIPP Lokal



Hasil Screen Shoot SIPP Lokal Pada Sidang Terakhir Pengadilan Agama Muara Enim

Bab V

Peningkatan Pelayanan Publik

Akreditasi Penjaminan Mutu

Dalam komitmen melaksanakan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM), pada tahun 2018 Pengadilan Agama Muara Enim telah berhasil meraih predikat **A (Excellence)** yang diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 14 Juli 2018 di Balikpapan.

Gambar Sertifikat SAPM Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2018



Selanjutnya Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama ini dilakukan penilaian kembali setiap 1 (satu) tahun selama 3

(tiga) tahun dihitung tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan 22 Juni 2021, dengan rencana *audit surveillance* pada Juni 2019, Juni 2020, dan Juni 2021.

Pada *audit surveillance* pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2019, Senin 17 Juni 2019. *Lead Assessor*, Drs. H. Abdullah, S.H., M.H., datang dengan didampingi oleh tiga orang asesor pendamping, diantaranya Hj. Fara Umitha, S.H., Miftah Nurul Anwar, S.H., M.H., dan Arpita Pitriyanti, S.H., untuk melakukan *audit surveillance* pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2019 di Pengadilan Agama Muara Enim.

Pada *audit surveillance* pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2019 itu, Pengadilan Agama Muara Enim berhasil mempertahankan predikat **A (Excellent)**, sesuai Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 5367/DJA/OT.01.3/ X/2019 tanggal 30 Oktober 2019.

Gambar Lampiran Surat Dirjen Badilag Atas Assessment Surveillance APM Tahun 2019

Lampiran Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI
Nomor : 5367 /DJA/OT.01.3/X/2019
Tanggal : 30 Oktober 2019

**HASIL AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN AGAMA
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019**

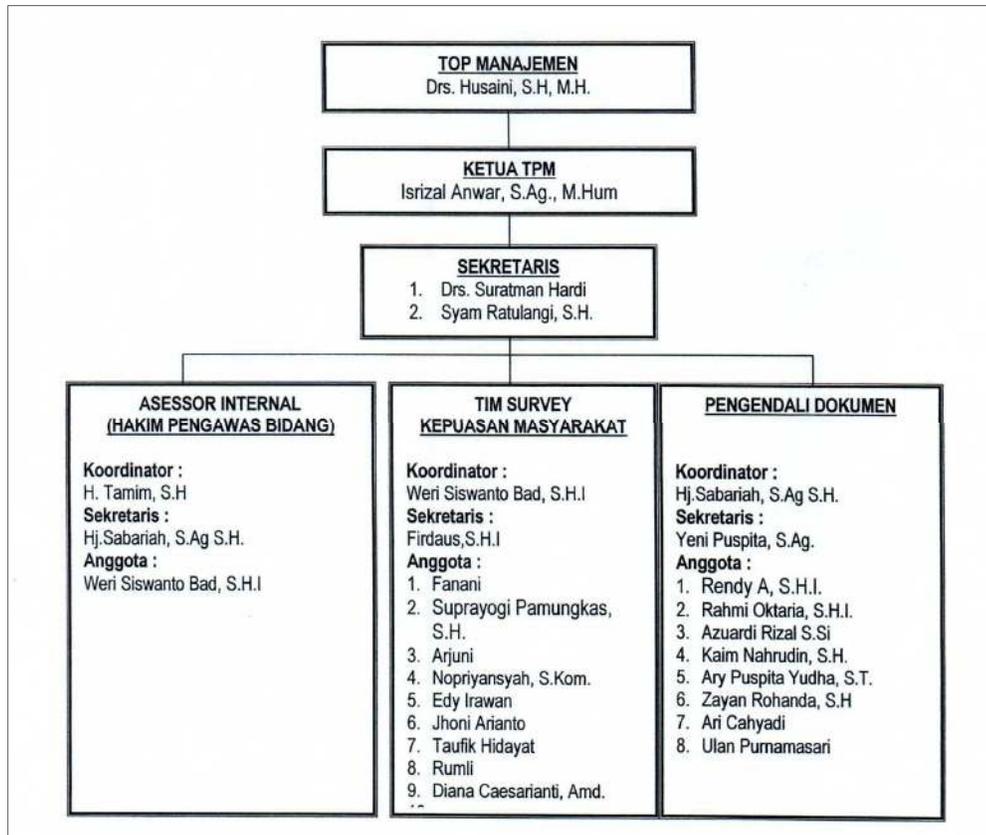
NO	SATUAN KERJA	KELAS	PREDIKAT	PEROLEHAN
7	PTA Palembang			
1.	PTA Palembang	-	A (Excellent)	Surveillance I 2019
2.	PA Sekayu	II	A (Excellent)	SAPM II 2018
3.	PA Lubuk Linggau	IB	A (Excellent)	SAPM II 2018
4.	PA Kayu Agung	IB	A (Excellent)	Surveillance I 2018
5.	PA Palembang	IA	A (Excellent)	Surveillance I 2018
6.	PA Muara Enim	IB	A (Excellent)	Surveillance I 2019
7.	PA Baturaja	IB	A (Excellent)	Surveillance I 2019
8.	PA Lahat	IB	A (Excellent)	Surveillance I 2019

Kemudian dalam menghadapi *audit surveillance* kedua Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2020, Ketua Pengadilan Agama Muara Enim, Drs. Husaini, S.H., M.H.. telah membentuk Tim Penjaminan Mutu (TPM), berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Nomor W6-A5/984/OT.01.3/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.

Tabel Susunan Tim Penjamin Mutu Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020

NO	NAMA /NIP	JABATAN	
		DALAM INSTANSI	DALAM TIM AKREDITASI
1.	Drs. Husaini, S.H, M.H	KETUA	TOP MANAJEMAN
2.	Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum.	WAKIL KETUA	KETUA TIM PENJAMINAN MUTU
3.	Drs. Suratman Hardi	PANITERA	SEKRETARIS
4.	Syam Ratulangi, S.H.	SEKRETARIS	
5.	H. Tamim, S.H	HAKIM	ASESSOR INTERNAL
6.	Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.	HAKIM	
7.	Weri Siswanto Bad, S.H.I.	HAKIM	
8.	Weri Siswanto Bad, S.H.I.	HAKIM	TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
9.	Firdaus,S.H.I.	PANITERA MUDA HUKUM	
10.	Fanani	JURU SITA	
11.	Suprayogi Pamungkas, S.H.	JURU SITA	
12.	Arjuni	HONORER	
13.	Nopriyansyah, S.Kom	HONORER	
14.	Edy Irawan	HONORER	
15.	Jhoni Arianto	HONORER	
16.	Taufik Hidayat	HONORER	
17.	Rumli	HONORER	
18.	Diana Caesarianti, A.Md.	HONORER	PENGENDALI DOKUMEN
19.	Yeni Puspita, S.Ag.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	
20.	Rendy A, S.H.I.	PANMUD GUGATAN	
21.	Rahmi Oktaria, S.H.I.	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	
22.	Azuardi Rizal, S.S.I.	KASIBBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	
23.	Kaim Nahrudin, S.H.	JURU SITA	
24.	Zayan Rohanda, S.H.	SATF KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	
25.	Ary Puspita Yudha, S.T.	STAF UMUM DAN KEUANGAN	
26.	Ari Cahyadi	HONORER	
27.	Ulan Purnamasari, S.H.	HONORER	

Bagan Struktur Tim Penjamin Mutu Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020



Pada *audit surveillance* kedua Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2020, Rabu 11 November 2020 Tim Asesmen Eksternal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Wahyu Setiyawan, S.H. sebagai *Lead Asessor* dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Hj. Farah Umita, S.H. (Pendamping Asessor) dan Arpita Fitriyanti, S.H. (Pendamping Asessor), berdasarkan surat tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 493/DjA.3/ST/11/2020 tanggal 6 November 2020 dan surat tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor W6-A/1681/OT.01.3/XI/2020 tanggal 9 November 2020 telah selesai melaksanakan observasi implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Muara Enim yang merupakan bagian dari penilaian *assessment surveillance* kedua.

Berdasarkan hasil rapat komite keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020, Pengadilan Agama Muara Enim berhasil mempertahankan predikat **A (Excellent)**, sesuai Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3955/DjA.3/HM.00/11/2020 tanggal 30 November 2020.

Gambar Lampiran Surat Dirjen Badilag Atas Assessment Surveillance APM Tahun 2020

Lampiran Surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama/
Ketua Tim Akreditasi Penjaminan Mutu
Badan Peradilan Agama MA RI
Nomor: 3955/DjA.3/HM.00/11/2020
Tanggal: 30 November 2020

**PENETAPAN HASIL ASSESSMENT SURVEILLANCE
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2020**

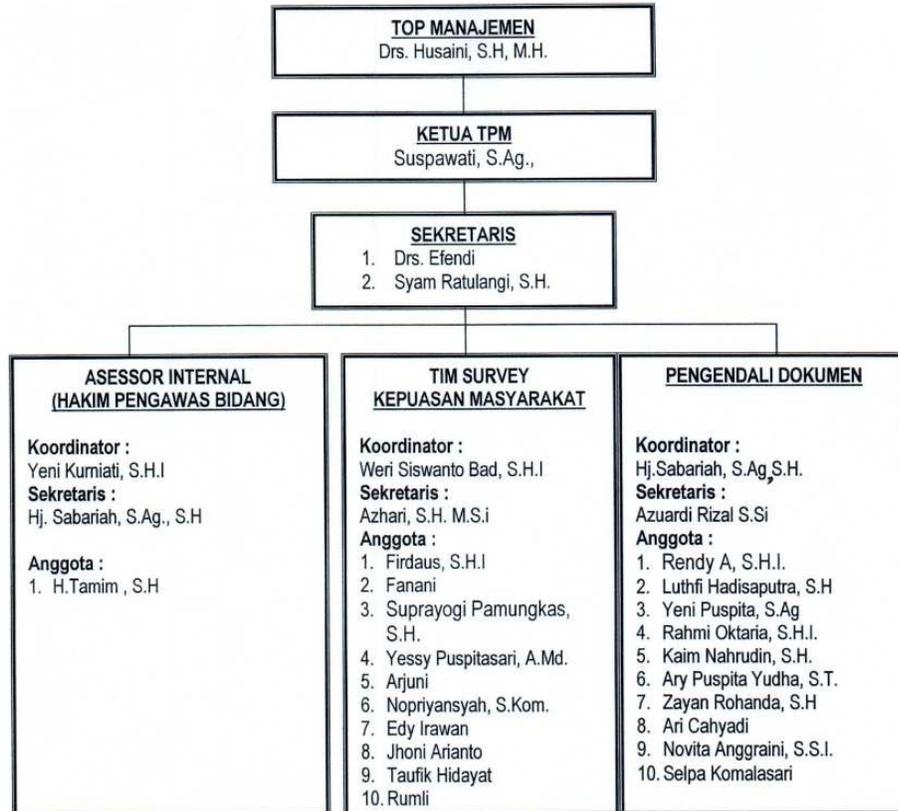
NO.	UNIT KERJA	KELAS	PREDIKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
VI	PTA PALEMBANG	-	A (Excellent)	TETAP
1	PA PALEMBANG	IA	A (Excellent)	TETAP
2	PA BATURAJA	IB	A (Excellent)	TETAP
3	PA KAYU AGUNG	IB	A (Excellent)	TETAP
4	PA LAHAT	IB	A (Excellent)	TETAP
5	PA LUBUK LINGGAU	IB	A (Excellent)	TETAP
6	PA MUARA ENIM	IB	A (Excellent)	TETAP
7	PA MARTAPURA (p)	II	A (Excellent)	NAIK
8	PA MUARADUA	II	A (Excellent)	NAIK
9	PA PAGAR ALAM	II	A (Excellent)	TETAP
10	PA PANGKALAN BALAI	II	A (Excellent)	TETAP
11	PA PRABUMULIH	II	A (Excellent)	NAIK
12	PA SEKAYU	II	A (Excellent)	TETAP

Kemudian dalam menghadapi *audit surveillance* Ketiga Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2021, Ketua Pengadilan Agama Muara Enim, Drs. Husaini, S.H., M.H.. telah membentuk Tim Penjaminan Mutu (TPM), berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Nomor W6-A5/1180/OT.01.3/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.

Tabel Susunan Tim Penjamin Mutu Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2021

NO	NAMA /NIP	JABATAN	
		DALAM INSTANSI	DALAM TIM AKREDITASI
1	2	3	4
1.	Drs. Husaini, S.H., M.H	KETUA	TOP MANAJEMAN
2.	Suspawati, S.Ag.	WAKIL KETUA	KETUA TIM PENJAMINAN MUTU
3.	Drs. Efendi	PANITERA	SEKRETARIS
4.	Syam Ratulangi, S.H.	SEKRETARIS	
5.	H. Tamim, S.H	HAKIM	ASESSOR INTERNAL
6.	Sabarlah , S.Ag, M.H	HAKIM	
7.	Yeni Kurniati, S.H.I	HAKIM	
8.	Weri Siswanto Bad, S.H.I	HAKIM	
	Azhari, S.H., M.S.i	PANMUD PERMOHONAN	TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
9.	Firdaus,S.H.I	PANMUD HUKUM	
10.	Fanani	JURUSITA	
11.	Suprayogi Pamungkas, S.H	JURUSITA	
12.	Yessi Puspitasari, A.M.d	STAF UMUM KEUANGAN	
13.	Arjuni	HONORER	
14.	Nopriyansyah, S.Kom	HONORER	
15.	Edy Irawan	HONORER	
16.	Jhoni Arianto	HONORER	
17.	Taufik Hidayat	HONORER	
18.	Rumli	HONORER	
19.	Diana Caesarianti	HONORER	PENGENDALI DOKUMEN
20.	Yeni Puspita, S.Ag.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	
21.	Firdaus,S.H.I	PANMUD HUKUM	
22..	Rendy A, S.H.I.	PANMUD GUGATAN	
23.	Luthfi Hadisaputra, S.H	PANITERA PENGGANTI	
24.	Rahmi Oktaria, S.H.I.	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	
25.	Azuardi Rizal, S.Si	KASUBBAG PERENCANAN TI DAN PELAPORAN	
26.	Kaim Nahrudin, S.H	JURUSITA	
27..	Ary Puspita Yudha, S.T.	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	
28.	Ari Cahyadi	STAF KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	
29	Novita Anggraini, S.S.I	STAF PERENCANAN TI DAN PELAPORAN	

Bagan Struktur Tim Penjamin Mutu Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2021



Pada *audit surveillance* ketiga Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2021, Kamis 11 November 2021 Tim Asesmen Eksternal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Siti Yanuarina Marhamah, S.H., M.H. sebagai *Lead Asessor* dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Miftah Nurul Anwar, S.H., M.H. (Pendamping Asessor) dan Arpita Fitriyanti, S.H. (Pendamping Asessor), berdasarkan surat tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3476/DJA.3/OT.00/10/2020 tanggal 8 Oktober 2021 telah selesai melaksanakan observasi implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Muara Enim yang merupakan bagian dari penilaian *assessment surveillance* ketiga.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penempatan dan Desain PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/ pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu.

Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Muara Enim terletak di sisi sudut kanan belakang gedung kantor. Pintu masuknya jadi satu kesatuan dengan pintu masuk ke ruang tunggu sidang. Para pihak berperkara dapat mengikuti petunjuk arah untuk menuju ke ruang tersebut.

Ruang PTSP Pengadilan Agama Muara Enim berbentuk persegi panjang dengan ukuran 12 m² x 6 m², dilengkapi tulisan “Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Muara Enim” di tengah dinding partisi, dan pada setiap lokat layanan dilengkapi papan keterangan jenis layanan yang terletak di bagian atas.

Gambar Desain Ruang PTSP Pengadilan Agama Muara Enim



PTSP dibentuk dan dioperasikan dengan tujuan mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada Pengguna Layanan; dan menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya Pengadilan.

PTSP di Pengadilan Agama Muara Enim diselenggarakan oleh Tim Pengelola PTSP yang terdiri atas pengarah PTSP yang dijabat oleh Ketua Pengadilan, Penanggungjawab PTSP yang dijabat oleh Panitera dan Sekretaris, Pelaksana PTSP yang dijabat oleh seluruh Panitera Muda dan Kepala Subbagian, dan Petugas PTSP yang dijabat oleh pegawai-pegawai yang dinilai cakap dan mampu.

Fasilitas PTSP

Fasilitas Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Muara antara lain :

Tabel Daftar Fasilitas PTSP

Nama Fasilitas PTSP	Jumlah	Kondisi	Keterangan
Meja Panjang Terintegrasi	1	Baik	Sesuai jumlah petugas PTSP
Kursi Petugas	6	Baik	Sesuai jumlah petugas PTSP
Kursi Hadap	6	Baik	Sesuai jumlah pengguna layanan PTSP
Kursi Tunggu	4	Baik	Untuk pengguna layanan PTSP menunggu antrian
Komputer	6	Baik	Sesuai jumlah petugas PTSP
Printer	2	Baik	Terdapat pada Petugas Kasir dan Produk Pengadilan
Brosur Daftar Panjar Biaya	1	Baik	Tersedia brosur yang dicetak warna serta dapat diambil oleh pengguna layanan PTSP
Brosur Syarat-Syarat Perkara	1	Baik	Tersedia brosur yang dicetak warna serta dapat diambil oleh pengguna layanan PTSP
Brosur Permohonan Informasi dan Pengaduan	1	Baik	Tersedia brosur yang dicetak warna serta dapat diambil oleh pengguna layanan PTSP
Telepon	1	Baik	Telepon saluran internal dan eksternal (PABX) yang difungsikan
Alat Tulis	6	Baik	Alat tulis yang tersedia sesuai jumlah petugas PTSP dan dipergunakan
Buku Register/Jurnal	3	Baik	Tersedia Register dan Jurnal yang digunakan
Kotak Saran	1	Baik	Kotak saran sebagai survei layanan harian

Papan Nama Petugas	6	Baik	Tersedia papan nama petugas PTSP yang disertai foto dan identitas
Papan Jam Layanan	1	Baik	Tersedia papan jam layanan petugas PTSP
Papan Jam Istirahat	1	Baik	Tersedia papan jam istirahat petugas PTSP

Sarana Penunjang PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Muara Enim dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan sudah didukung oleh sarana penunjang yang cukup memadai, diantaranya mesin antrian pengunjung, tv media center dan cctv. Untuk mengoptimalkan kinerja PTSP, Pengadilan Agama Muara Enim memanfaatkan aplikasi-aplikasi di bidang administrasi perkara (SIPP, E-Court, Gugatan Mandiri) dan administrasi umum yang disediakan Mahkamah Agung dan/atau dikembangkan oleh Pengadilan.

Layanan Pokok PTSP

Terdapat 6 (enam) jenis layanan pokok pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Muara Enim, yakni layanan permohonan informasi, layanan pendaftaran perkara, layanan e-court, layanan pembayaran biaya (kasir), layanan penyerahan produk pengadilan, dan layanan pengajuan keluhan/ pengaduan, dimana setiap loket layanan tersebut akan melayani sesuai jenis layanan masing-masing.

Layanan permohonan informasi meliputi :

1. Permohonan informasi biasa.
2. Permohonan informasi khusus.

Layanan e-court meliputi :

1. Pembuatan akun pengguna non advokat (perorangan, pemerintah, badan hukum, kuasa insidentil).
2. Aktivasi akun pengguna non advokat (perorangan, pemerintah, badan hukum, kuasa insidentil).

3. Validasi pendaftaran perkara e-court (gugatan online, gugatan sederhana online, permohonan online).
4. Pembuatan virtual account (e-payment).
5. Panggilan elektronik (e-summons).

Layanan pendaftaran perkara meliputi :

1. Pendaftaran perkara gugatan/ permohonan tingkat pertama.
2. Pengajuan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali.
3. Pendaftaran pemeriksaan setempat (Descente).
4. Pendaftaran permohonan konsinyasi.
5. Pendaftaran sita jaminan.
6. Pendaftaran permohonan eksekusi.
7. Layanan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Layanan layanan pembayaran biaya meliputi :

1. penaksiran panjar biaya perkara.
2. pemberian Surat Kuasa Untuk Membayar.
3. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
4. pengembalian sisa panjar biaya perkara.
5. penyerahan bukti-bukti pembayaran.
6. layanan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Layanan penyerahan produk pengadilan meliputi :

1. salinan putusan/ penetapan.
2. akta cerai.
3. dokumen-dokumen resmi Pengadilan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Layanan penyerahan produk pengadilan meliputi :

1. pelanggaran KEPPH.
2. penyalahgunaan wewenang/jabatan.
3. pelanggaran sumpah jabatan.

4. pelanggaran peraturan disiplin pegawai.
5. perbuatan tercela.
6. pelanggaran hukum acara.
7. mal administrasi.
8. pelayanan publik.

Layanan Pendukung PTSP

Terdapat 3 (Tiga) jenis layanan pendukung pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Muara Enim, yakni pemberian bantuan hukum (Posbakum), penyetoran panjar biaya perkara (Bank), dan pembelian meterai dan legalisir (Pos).

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Muara Enim tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk jasa layanan pos bantuan hukum, sehingga Pengadilan Agama Muara Enim melakukan kerjasama dengan Posbakum yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sedangkan layanan penyetoran panjar biaya perkara dilakukan dengan cara di ambil oleh petugas Bank BSI pada setiap pukul 15.00 WIB untuk selanjutnya di setor ke rekening perkara Pengadilan Agama Muara Enim. Kemudian untuk pembelian meterai dan legalisir dilakukan dengan cara mendatangkan petugas pos pada pukul 15.00 WIB untuk melakukan penempelan materai dan legalisir dokumen alat bukti.

Prosedur Layanan PTSP

Waktu operasional layanan PTSP sesuai dengan jam operasional kantor dan seluruh layanan dalam PTSP diberikan sesuai dengan prosedur baku . (*Standard Operating Procedure*) setiap jenis layanan pada PTSP.

<p>"SERUN - KARDIS" Waktu Layanan : 08.00 WIB - 16.00 WIB Waktu Distribusi : 08.00 WIB - 16.00 WIB</p>	<p>"JANJAI" Waktu Layanan : 08.00 WIB - 16.00 WIB Waktu Distribusi : 08.00 WIB - 16.00 WIB</p>	<p>"SABTU DAN PINGGAL" Waktu Saha Pelayanan "BAROKAH, PISIRI" Waktu Saha Pelayanan</p>
--	--	---

Performa Petugas PTSP

Petugas PTSP Pengadilan Agama Muara Enim sedemikian rupa dapat memahami kedudukan, struktur organisasi dan kompetensi Pengadilan, memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai Petugas PTSP, terampil mengoperasikan komputer, memahami prinsip-prinsip pelayanan Pengadilan yang prima, mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki kemampuan bekerja sama dalam Tim. Dalam meningkatkan kompetensi Petugas PTSP, Ketua Pengadilan telah mengupayakan Petugas PTSP untuk mengikuti pelatihan pelayanan Pengadilan yang dilakukan oleh trainer dari BRI.

Gambar Petugas PTSP Mengikuti Bimbingan Pemberian Layanan



Inovasi Pelayanan Publik

Pengadilan Agama Muara Enim telah melaporkan beberapa inovasi pelayanan publik kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, melalui Surat Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Nomor W6-A5/4412/KP.02.1/IX/2021, tentang Penilaian Kinerja Satuan Kerja Triwulan IV Tahun 2021 di Lingkungan Peradilan Agama. Adapun inovasi pelayanan publik tersebut diantaranya adalah Antrian PTSP.

Antrian PTSP merupakan aplikasi antrian bagi pengunjung yang hendak berurusan di ruang pelayanan terpadu satu pintu. Aplikasi ini berbasis web yang dijalankan pada sebuah server lokal dalam satu jaringan *local area network* (LAN). Dalam mengimplementasikan inovasi ini, dibutuhkan

perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan pengguna (*brainware*).

Kebutuhan perangkat keras untuk mengimplementasikan inovasi pelayanan publik berupa aplikasi antrian PTSP ini terdiri dari beberapa perangkat, yaitu :

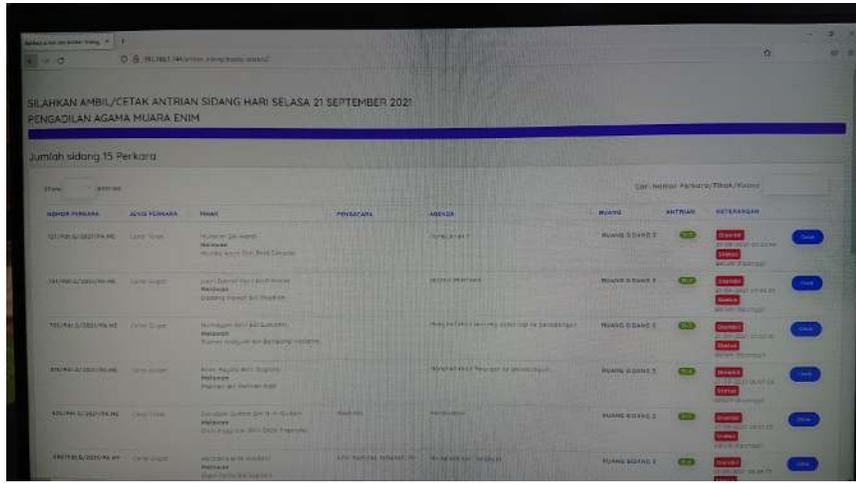
Tabel Kebutuhan Perangkat Keras untuk Aplikasi Antrian PTSP

Nama Perangkat	Jumlah	Spesifikasi Minimum	Uraian Keperluan
Kios Touch Screen	1 Unit	OS Android, Layar Sentuh, LAN/Wifi, Speaker	Digunakan untuk mengambil nomor antrian pengunjung
All In One PC Desktop	4 Unit	OS Windows 10 64 Bit, DDR4 4GB, 500GB Hardisk, LAN/Wifi	Digunakan untuk petugas meja loket : 1. Informasi 2. Pendaftaran 3. Kasir 4. Produk Pengadilan
TV Led	1 Unit	Layar 32 Inchi, HDMI, Speaker	Digunakan untuk menampilkan nomor antrian yang sedang di panggil ke meja loket, dan sekaligus mengeluarkan suara pemanggilan nomor antrian
Printer Thermal	1 Unit	Support Windows, USB Port, Ukuran Kerta 58 mm	Digunakan untuk mencetak nomor antrian yang diambil oleh pengunjung

Gambar Tampilan Utama Aplikasi Antrian Sidang dan PTSP



Gambar Tampilan Locket Ambil Antrian Aplikasi Antrian Sidang

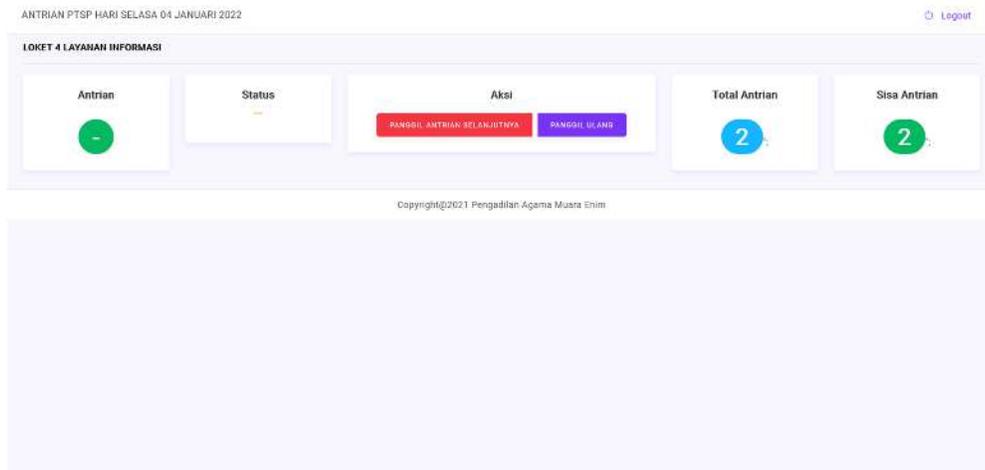


Gambar Tampilan Locket Ambil Antrian Aplikasi Antrian PTSP



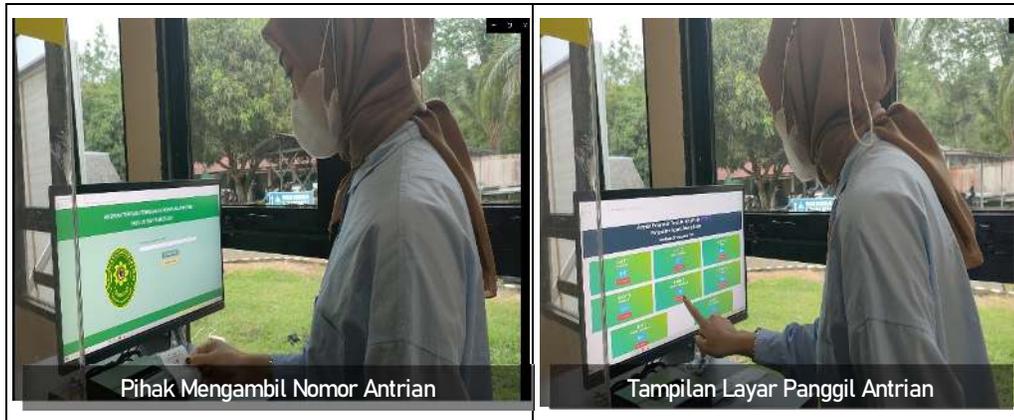
Copyright©2021 Pengadilan Agama Muara Enim

Gambar Tampilan Meja Loker Aplikasi Antrian PTSP



Inovasi pelayanan publik antrian PTSP ini dibuat dan dikembangkan sendiri oleh Pengadilan Agama Muara Enim. Penyelesaian pekerjaan pembuatan aplikasi ini yaitu pada tanggal 3 September 2019 dan telah diimplementasikan secara utuh pada awal Januari 2020, kemudian sampai sekarang aplikasi antrian PTSP ini masih berjalan dengan baik dan dapat digunakan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Agama Muara Enim. Aplikasi ini dinilai sangat bermanfaat dalam menertibkan pelayanan informasi, pendaftaran, kasir, dan produk pengadilan di ruang PTSP.

Gambar Para Pihak Mengambil Antrian Layanan PTSP



Selain dari inovasi pelayanan publik yang dikembangkan sendiri, Pengadilan Agama Muara Enim juga mengimplementasikan 11 (sebelas) Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Agama yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok, sebagaimana Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1517/DjA/HM.00/4/2020, tanggal 22 April 2020 tentang Himbauan Memasang Poster 11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor W6-A/884/HK.05/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020 tentang laporan pelaksanaan 11 aplikasi unggulan Ditjen Badilag.

Sebelas Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Agama tersebut telah di instal dan diuji coba dan berjalan dengan baik. Berikut ini gambaran hasil implementasi pelaksanaannya :

11 (sebelas) Aplikasi Inovasi Dirjen Badilag



1. Aplikasi Notifikasi Perkara

Pengadilan adalah lembaga yang terbuka untuk semua kalangan, namun seringkali masyarakat yang datang ke pengadilan adalah masyarakat awam yang baru pertama kali datang ke pengadilan, jangankan mengerti persoalan hukum, persoalan administrasi di pengadilan pun terkadang membuat bingung. Bagaimana proses yang harus dijalani, apa yang harus disiapkan, berapa biaya yang harus dikeluarkan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara.

Proses berperkara di persidangan memang harus melewati tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan, dari tahapan administrasi sampai tahapan persidangan. Para pihak sering kali bingung atau mungkin tidak tahu apa yang mesti dilakukan setelah melewati satu proses, sehingga dibutuhkan satu cara atau terobosan untuk bisa mengingatkan para pihak bahwa proses perkara yang dijalannya sudah sampai tahapan apa. Hal ini akan memudahkan pihak yang berperkara untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan baik.

Aplikasi notifikasi perkara ini merupakan hal sederhana yang bisa diterapkan secara nasional, meskipun bukan sesuatu yang sama sekali baru, karena di beberapa pengadilan juga sudah menerapkannya, namun untuk diterapkan secara menyeluruh di semua pengadilan agama tingkat pertama belum pernah dilakukan. Inilah yang mendorong Ditjen Badilag untuk mengembangkan sistem aplikasi ini.

Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pihak berperkara terkait perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang berjalan, baik itu pihak prinsipal dalam suatu perkara maupun Kuasa Hukumnya.

Aplikasi ini menggunakan SIPP sebagai basis data utama. Verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersumber dari data kependudukan dan nomor perkara, sehingga notifikasi yang diberikan dapat terkelompok dan tepat sasaran kepada pihak berperkara.

Gambar Tampilan Balasan Notifikasi SMS



Gambar Banner / Brosur SMS Notifikasi Perkara



Fungsi Aplikasi :

1. Memberikan notifikasi terkait status perkara kepada pihak, yang meliputi jadwal sidang, status perkara dan keuangan perkara.
2. Bersifat aktif (sistem memberikan notifikasi secara kontinyu).

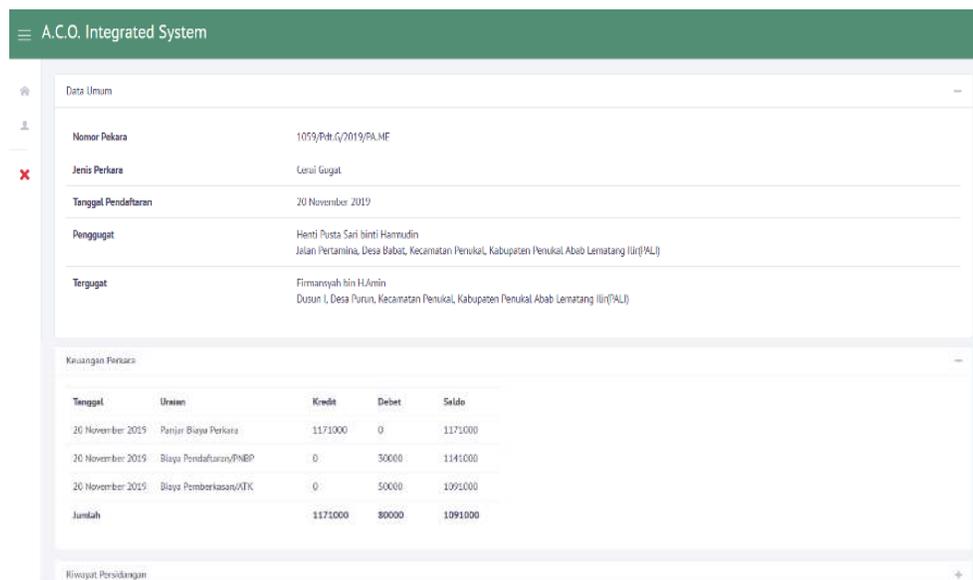
2. Aplikasi Informasi Produk dan Perkara

Berkaitan dengan aplikasi notifikasi perkara, aplikasi ini bersifat informatif dan lebih umum, mungkin fungsinya seperti website yang memuat segala informasi mengenai suatu pengadilan, namun sifatnya lebih aktif dan personal kepada pengguna pengadilan. Aplikasi ini akan berguna untuk

mendekatkan pengadilan kepada masyarakat, menghindari praktik-praktik yang tidak semestinya seperti makelar perkara dan pungutan liar.

Aplikasi ini merupakan suatu aplikasi yang terintegrasi dengan data SIPP, memberikan informasi kepada pihak berperkara atau masyarakat secara real time dan ter-update mengenai layanan dan produk pengadilan.

Gambar Tampilan Aplikasi Informasi dan Produk Perkara



The screenshot displays the 'A.C.O. Integrated System' interface. It features a sidebar with navigation icons and a main content area. The main area is divided into two sections: 'Data Umum' (General Data) and 'Keuangan Perkara' (Case Finance).

Data Umum

Nomor Perkara	105/Pdt.G/2019/PA.ME
Jenis Perkara	Loral Gugat
Tanggal Pendaftaran	20 November 2019
Penggugat	Henti Puja Sari hini Hamudin Jalan Pertamina, Desa Babat, Kecamatan Penulak, Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir (PALI)
Tergugat	Firmanayah bin H.Amin Dusun 1, Desa Purut, Kecamatan Penulak, Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir (PALI)

Keuangan Perkara

Tanggal	Uraian	Kredit	Debet	Saldo
20 November 2019	Panjar Biaya Perkara	1171000	0	1171000
20 November 2019	Biaya Pendaftaran/PNBP	0	30000	1141000
20 November 2019	Biaya Pemberkasan/STK	0	50000	1091000
Jumlah		1171000	80000	1091000

Fungsi Aplikasi : Memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak, yang meliputi nomor perkara, nama para pihak, susunan majelis hakim, tahapan persidangan, jadwal persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan dari para pihak.

3. Aplikasi Antrian Sidang

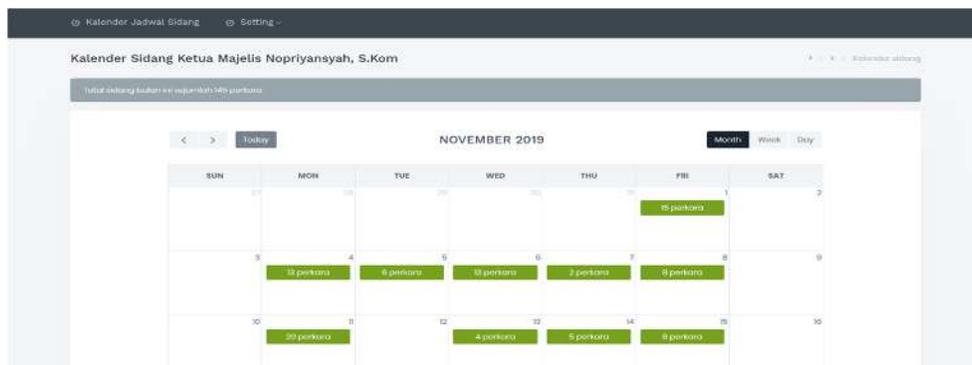
Pengadilan Agama adalah salah satu pengadilan yang menangani perkara dengan volume yang sangat tinggi/overload, mengingat banyaknya jumlah perkara yang disidangkan setiap harinya, khususnya di pulau jawa.

Selain itu, terbatasnya jumlah hakim dan jumlah ruang sidang mengakibatkan persidangan harus dilakukan secara bergantian, yang pada akhirnya mengakibatkan masa tunggu untuk mengikuti sidang menjadi cukup lama.

Sudah lazim diketahui, sebaran jumlah perkara di berbagai wilayah sangatlah variatif, ini sangat tergantung kepada padatnya jumlah penduduk dan jumlah penduduk muslim yang ada di suatu daerah.

Aplikasi Antrean sidang ini merupakan aplikasi yang dapat memberikan pembagian jadwal persidangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pihak berperkara dapat melakukan pendaftaran antrean secara online sehingga dapat mengatur waktu persidangan, dan diharapkan tidak terjadi antrean panjang, lama dan melelahkan untuk mengikuti persidangan.

Gambar Tampilan Aplikasi Antrian Sidang online



Fungsi Aplikasi :

1. Menyediakan pendaftaran antrean secara online.
2. Memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat, sesuai dengan kebutuhannya.

4. Aplikasi Data Kemiskinan

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan mengatur tentang pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Pembebasan Biaya Perkara; Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pos Pelayanan Hukum di Pengadilan. Pembebasan biaya perkara artinya para pencari keadilan yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma melalui anggaran DIPA yang diberikan oleh negara.

Kemudahan yang diberikan Perma 1/2014 ternyata menyisakan sedikit persoalan dalam pelaksanaannya. Pembebasan biaya perkara yang sudah dianggarkan pada suatu pengadilan tidak terserap dengan baik, disebabkan sulitnya masyarakat untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) dari kelurahan atau surat sejenisnya yang diperlukan, bahkan untuk pembuatan surat tersebut seringkali membutuhkan lebih banyak waktu dan juga biaya.

Ditjen Badilag telah membuat aplikasi verifikasi data kemiskinan, aplikasi ini nantinya dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, sehingga pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses database terkait status kemiskinan, pendaftar perkara cukup membawa identitas kependudukan, sistem akan secara otomatis memverifikasi melalui nomor induk kependudukannya.

Gambar Tampilan Aplikasi Data Kemiskinan



The screenshot displays the SIMTALAK application interface. At the top, there is a navigation bar with the SIMTALAK logo and a 'Dashboard' menu. Below this, the main content area shows a form for data entry. The form includes a search bar with the text '160302410849002' and a 'CARI' button. The form fields are as follows:

Nama	Erna Kasmina
Tempat Lahir	
Tanggal Lahir	
Jenis Kelamin	Perempuan
Alamat	Jl Letnan Idria Basir Rt 03 Bw 02

At the bottom of the form, there is a 'CETAK' button. The footer of the application shows the copyright information: 'Copyright © 2016 TSM IT (Open-Source)'.

Gambar Tampilan Hasil Cetak Aplikasi Data Kemiskinan

DATA PENDUDUK MISKIN BASIS DATA TERPADU TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)	
NIK	1603024108840002
Nama	Ema Kasmira
Tempat / Tanggal Lahir	/
Jenis Kelamin	Perempuan
Alamat	Jl Letnan Idris Basin Rt 03 Rw 02
Nomor Kartu Program Keluarga Harapan	
Nomor Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/ Kartu Perlindungan Sosial (KPS)	
Nomor Kartu Penerima Bantuan Iuran BPJS	

Data tersebut di atas dicetak melalui Aplikasi Basis Data Terpadu Daftar Penduduk Miskin pada Ditjen Badan Peradilan Agama di laman <https://simalak.badilag.net> bekerjasama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk kepentingan beracara secara prodeo pada Pengadilan Agama Muara Enim.

Dicetak di _____
Pada tanggal 16 Oktober 2019
Petugas Cetak
(_____)
NIP. _____

5. Aplikasi Command Center

Untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan agama baik tingkat pertama maupun banding, Ditjen Badilag selalu membuat program kerja yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di pengadilan agama baik itu teknis yudisial maupun non teknis yudisial baik dalam bentuk pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis.

Banyaknya jumlah satuan kerja dan jumlah pegawai di lingkungan peradilan agama menyebabkan kebutuhan tenaga dan biaya pembinaan menjadi besar, hal ini berimplikasi pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan bimbingan dan monitoring terhadap seluruh hakim dan aparat peradilan jika hal ini dilakukan dengan cara konvensional.

Perlu dicari cara agar koordinasi antara pusat dan daerah bisa berjalan dengan baik, berbiaya murah, cakupan wilayah dan peserta yang lebih banyak, dan hasil yang lebih maksimal.

Command Center bukan merupakan hal yang baru, bahkan di beberapa negara maju penggunaannya adalah hal yang lazim. Namun pemanfaatannya untuk lembaga peradilan masih belum masif digunakan. Luasnya wilayah dengan kondisi geografis yang rumit di Indonesia menjadikan hal ini sebagai suatu terobosan yang patut untuk diaplikasikan secepatnya.

Ditjen Badilag sedang mengembangkan Command Center Badilag yang mempunyai fungsi tidak hanya untuk pembinaan dan pengawasan, namun juga fungsi-fungsi penunjang lainnya untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan agama dan menciptakan iklim koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja.

Gambar Tampilan Aplikasi Command Center



Fungsi Aplikasi

1. Pusat kontrol data manajemen peradilan agama seluruh Indonesia, mengatur dan mengendalikan data berbasis teknologi informasi berupa

pusat data dan memiliki ruangan khusus dengan berbagai peralatan khusus.

2. Pusat Pembinaan, pengawasan dan audit kinerja secara virtual dan real time.
3. Pusat pengembangan E Learning.
4. Pusat pengembangan aplikasi manajemen, terdiri dari berbagai aplikasi yang mendukung pelaksanaan tupoksi peradilan agama.
5. Sarana konsultasi dan bantuan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tupoksi tenaga teknis dan non-teknis pengadilan agama di seluruh Indonesia.

6. Aplikasi PNBP Fungsional

Ada persoalan yang beberapa tahun belakangan belum bisa ditemukan solusinya. Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan, pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP Fungsional) dalam proses penerimaan perkara di pengadilan tidak bisa diidentifikasi secara rinci, sehingga mengakibatkan pelaporan PNBP Fungsional Keuangan perkara terkait jumlah dan waktu tidak akurat. Hal ini tentu menjadi persoalan yang cukup serius.

Ditjen Badilag mengembangkan aplikasi yang diharapkan bisa mengatasi persoalan ini, aplikasi ini dapat membantu pencatatan PNBP Fungsional perkara seluruh pengadilan agama secara terpusat, Penyetoran PNBP Fungsional tepat waktu dan lengkap, yang mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara, sebagai sarana informasi jumlah perkara yang belum disetor PNBP Fungsional pada tahun berjalan.

Gambar Tampilan Aplikasi PNBP Fungsional

The screenshot displays the 'BUKU PENERIMAAN HAK HAK KEPANITERAAN (PNBP)' interface. It includes a search bar for the date (16/10/2019) and a 'Cetak' button. The main table lists transactions with the following columns: Tanggal, Urutan, No Bukti, Biaya Pendaftaran (Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi, Peninjauan Kembali), Biaya Regeski, Jumlah, and Keterangan.

Tanggal	Urutan	No Bukti	Biaya Pendaftaran				Biaya Regeski	Jumlah	Keterangan
			Tingkat Pertama C1	Tingkat Banding C3	Tingkat Kasasi A1	Peninjauan Kembali A2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 Oktober 2019	467/Pdt.G/2019/PA.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	10.000,00,-	
16 Oktober 2019	874/Pdt.G/2019/PA.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	10.000,00,-	
16 Oktober 2019	875/Pdt.G/2019/PA.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	10.000,00,-	
16 Oktober 2019	881/Pdt.G/2019/PA.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	10.000,00,-	
16 Oktober 2019	883/Pdt.G/2019/PA.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	10.000,00,-	
16 Oktober 2019	885/Pdt.G/2019/PA.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	60.000,00,-	
16 Oktober 2019	886/Pdt.G/2019/PA.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	70.000,00,-	
16 Oktober 2019	888/Pdt.G/2019/PA.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	80.000,00,-	

Fungsi Aplikasi

1. Pencatatan PNBP Fungsional secara lengkap, mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara.
2. Sebagai sarana informasi jumlah perkara yang belum disetorkan PNBP Fungsional ke Kas Negara pada tahun berjalan.
3. Pengukuran kinerja kasir dan bendahara penerimaan.

7. Aplikasi E-Eksaminasi

Saat ini belum ada mekanisme untuk mengetahui kualitas putusan hakim, biasanya untuk mengetahui kualitas putusan hakim dalam jumlah banyak hanya bisa dilakukan dengan cara penelitian yang membutuhkan waktu lama, biaya yang banyak, dan hasilnya pun masih sangat terbatas. Dengan kuantitas satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia yang cukup besar (412 pengadilan tingkat pertama, 29 Satker tingkat banding) dengan banyaknya jumlah hakim menjadi tantangan tersendiri bagi Ditjen Badilag untuk memetakan kualitas putusan dan berkas perkara serta kemampuan teknis administrasi yustisial hakim peradilan agama di Indonesia.

Selama ini, terdapat kendala yang dialami Ditjen Badilag ketika ingin mengetahui dan melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas putusan hakim, karena ketidaktersediaan data kualitatif yang seharusnya dapat dikuantitatifkan tersebut. Meskipun MA sudah mempunyai basis data putusan pengadilan dalam Direktori Putusan, namun belum punya mekanisme dalam mengolah data tersebut menjadi suatu penilaian kualitatif. Ditjen Badilag akan melakukan eksaminasi silang terhadap putusan hakim tingkat pertama, dimana putusan hakim tingkat pertama akan dieksaminasi oleh 3 (tiga) hakim tinggi yang bertugas di wilayah hukum pengadilan tinggi agama yang berbeda.

Aplikasi ini akan menghimpun putusan hakim tingkat pertama melalui Direktori Putusan, kemudian setiap putusan akan dicek kelengkapan data perkaranya melalui aplikasi SIPP, kemudian dieksaminasi oleh tiga orang hakim tinggi di wilayah hukum pengadilan tinggi agama yang berbeda, proses ini dilakukan secara anonim, artinya hakim tingkat pertama yang dieksaminasi tidak mengetahui siapa yang melakukan eksaminasi, hal ini untuk menjaga objektivitas proses eksaminasi.

Aplikasi ini adalah sebuah sistem evaluasi dan penilaian secara elektronik terhadap penerapan hukum formil dan materiil oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

E-Eksaminasi merupakan sistem yang dapat memberikan informasi dan pemetaan terhadap kompetensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sehingga dapat digunakan sebagai data awal dalam rencana pengembangan kebijakan, diklat, serta promosi dan mutasi.

Gambar Tampilan Aplikasi E-Eksaminasi

NO	PESERTA		EKSAMINATOR		STATUS	NOMOR PERKARA	NILAI	DETAIL
	MULAI	SELESAI	MULAI	SELESAI				
1	6 September 2021	22 September 2021	23 September 2021	7 November 2021	Selesai	325/Pdt.G/2021/PA/ME	-	IP

Fungsi Aplikasi

1. Untuk meningkatkan profesionalisme hakim, baik segi teknis yuridis maupun administrasi perkara.
2. Mendapatkan bahan masukan berupa fakta dan data pelaksanaan hukum materiil dan formil oleh Hakim dalam memutuskan suatu perkara.
3. Mendorong Hakim untuk meningkatkan integritas, kredibilitas, dan profesionalisme dalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
4. Mendapatkan bahan pemetaan kompetensi dan pemerataan komposisi Hakim di peradilan agama.
5. Mendapatkan bahan pembinaan yang lebih tepat sasaran guna penyusunan perencanaan peningkatan kompetensi Hakim dalam bentuk bimbingan teknis dan pendidikan serta pelatihan.

8. E-Register

Bahwa yang dimaksud dengan e-Register perkara adalah seluruh data perkara yang terdapat pada sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Ketua Pengadilan bertanggung jawab penuh dalam melakukan monitoring dan evaluasi setiap hari kerja, paling lambat satu jam sebelum jam kerja berakhir guna memastikan seluruh data perkara dan data keuangan perkara pada hari tersebut telah diinput ke dalam aplikasi SIPP secara tepat dan benar.

Data perkara yang terdapat dalam aplikasi SIPP secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Pengadilan harus dapat menyajikan data register perkara secara tepat waktu berupa softcopy apabila diperlukan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal atau eksternal.

Oleh karena itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama membangun aplikasi e-Register yang dapat dipergunakan untuk mendukung kinerja peradilan agama dalam mengumpulkan dan menyajikan data perkara secara elektronik.

Aplikasi e-Register mempunyai beberapa menu utama, yaitu menu Validasi, Cetak dan Register Non SIPP.

Gambar Tampilan Aplikasi E-Register

The screenshot shows the 'e-Register' application interface for the 'PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM'. The main content area is titled 'STATISTIK REGISTER DAN PERKARA'. It features a table with the following data:

No	Nama Register	Jumlah Data
1	Register Induk Perkara Pemohonan	8
2	Register Induk Perkara Gugatan	30
3	Register Pemohonan Banding	0
4	Register Pemohonan Kasasi	0
5	Register Pemohonan Peninjauan Kembali	0
6	Register Penyitaan Barang Bergerak	-
7	Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak	-
8	Register Surat Kuasa	0
9	Register Eksekusi	0
10	Register Akta Cerai	19
11	Register Perkara Jinayah	0
12	Register PKHP	0
13	Register Ekonomi Syariah	0
14	Register Perkara Lainnya	0

Gambar Tampilan Validasi pada Aplikasi E-Register

Perbandingan Validasi Data Harian Tanggal 26 Desember 2021 dan Data SIPP Sekarang

Data Validasi Harian				Data SIPP		
No	Nama Proses	Rekap Jumlah Data Validasi	Rekap Jumlah Data Validasi Ulang	No	Nama Proses	Rekap Jumlah Data SIPP
1	Pendaftaran	0	0	1	Pendaftaran	0
2	Persidangan	17	0	2	Persidangan	17
3	Mediasi	2	0	3	Mediasi	2
4	Hasil Mediasi	0	0	4	Hasil Mediasi	0
5	Putusan	11	0	5	Putusan	11
6	Minutus	10	0	6	Minutus	11
7	Pendaftaran Upaya Hukum	0	0	7	Pendaftaran Upaya Hukum	0
8	Eksekusi	0	0	8	Eksekusi	0
9	Penetapan Ikrar Talak	1	0	9	Penetapan Ikrar Talak	1
10	Penerbitan Akta Cerai	0	0	10	Penerbitan Akta Cerai	1

Kembali Request Validasi Ulang

26 Desember 2021	Dr. Blend	Panitera/Wakil Panitera	Cetak	Detail
27 Desember 2021	Dr. Blend	Panitera/Wakil Panitera	Cetak	Detail
28 Desember 2021	Dr. Blend	Panitera/Wakil Panitera	Cetak	Detail
29 Desember 2021	Dr. Blend	Panitera/Wakil Panitera	Cetak	Detail
22 Desember 2021	Dr. Blend	Panitera/Wakil Panitera	Cetak	Detail

Gambar Tampilan Cetak Register pada Aplikasi E-Register

e-Register
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Selamat Datang Dr. Blend
Anda Login Sebagai (Panitera/Wakil Panitera) [Logout e-Register](#)

Bantuan Validasi Pendaftaran Register **Cetak Register**

REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN total : 7.623

Ketik kata kunci

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Tahapan	Status Perkara	Aksi
1	39/Pdt.G/2022/PA.ME	04 Januari 2022	Cerai Gugat	Pengggugat: Rahayu binti Santosa Tergugat: Pasha Laksana bin Anwar Umarwan	Penetapan	Penunjukan Juri	[Detail]
2	29/Pdt.G/2022/PA.ME	04 Januari 2022	Cerai Gugat	Pengggugat: Suberti binti Suwaji Tergugat: Pristito Bab Robinson	Penetapan	Penunjukan Juri	[Detail]
3	28/Pdt.G/2022/PA.ME	04 Januari 2022	Cerai Gugat	Pengggugat: Irma Baidi Milianti binti Mulya Tergugat: Ranggga Prandita Bin Pandiman	Penetapan	Penunjukan Juri	[Detail]
4	37/Pdt.G/2022/PA.ME	04 Januari 2022	Cerai Gugat	Pengggugat: Inayah Yuvanti binti Sukman Tergugat: Iri Anqa Harjano bin Sudarta	Penetapan	Penunjukan Juri	[Detail]
5	36/Pdt.G/2022/PA.ME	04 Januari 2022	Cerai Talak	Pemohon: Oeta Candaryah bin Abdul Karyid Terdakwa: Alustika Kaku binti Jon Kenadi	Penetapan	Sidang pertama	[Detail]
6	20/Pdt.G/2022/PA.ME	04 Januari 2022	Cerai Gugat	Pengggugat: Alenika binti Ruslan	Penetapan	Sidang pertama	[Detail]

Fungsi Aplikasi :

1. Sebagai salah satu sarana validasi data SIPP satuan kerja.
2. Sarana pencetakan buku-buku register sesuai pola bindalmin.

9. E-Kuangan

Administrasi Keuangan Perkara secara elektronik (e-keuangan perkara) merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi keuangan perkara di

pengadilan, untuk mempercepat terwujudnya administrasi peradilan secara

efektif, efisien, dan modern, sekaligus bentuk implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi keuangan perkara merupakan aplikasi pendukung SIPP yang mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II). Aplikasi ini digunakan untuk memonitor dan mencetak laporan keuangan perkara meliputi:

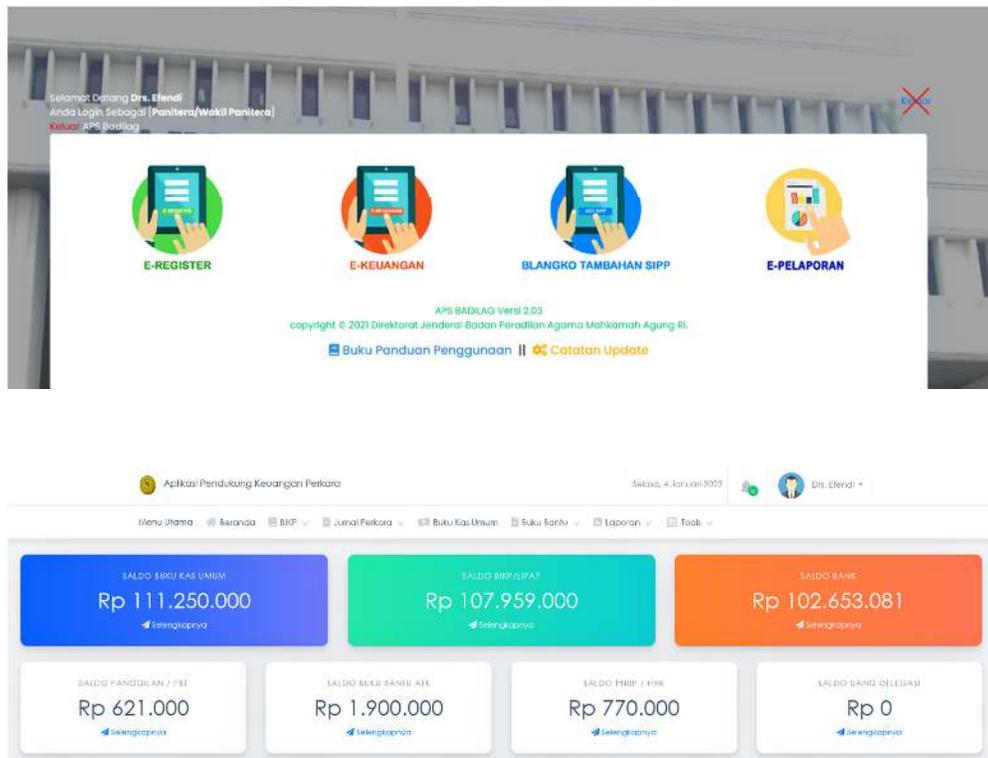
- a. Buku Jurnal Perkara Gugatan (KI-PA1/G)
- b. Buku jurnal perkara permohonan (KI-PA1/P)
- c. Buku jurnal permohonan banding (KI-PA2)
- d. Buku jurnal permohonan kasasi (KI-PA3)
- e. Buku jurnal permohonan peninjauan kembali (KI-PA4)
- f. Buku jurnal permohonan eksekusi (KI-PA5)
- g. Buku induk keuangan perkara (KI-PA6)
- h. Buku keuangan biaya eksekusi (KI-PA7)
- i. Buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan (KI-PA8a)
- j. Buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan lainnya (KI-PA8b)

Hasil cetak buku induk keuangan perkara pada aplikasi ini, dibagi menjadi tiga versi, meliputi:

- a. Versi bindalmin, yaitu hasil cetaknya sama persis Buku Induk Keuangan Perkara pada umumnya.
- b. Versi ringkas, di mana kolom-kolom dalam Buku Induk Keuangan Perkara lebih ringkas menyesuaikan transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara.
- c. Versi rekap, yaitu hasilnya dikelompokkan berdasarkan nomor perkara Penerapan aplikasi keuangan perkara di lingkungan peradilan agama

diatur dalam Surat Dirjen Badilag Nomor 0424/DJA/HM.00/II/2019, tanggal 11 Februari 2019, hal Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara Elektronik pada Peradilan Agama dan Surat Dirjen Badilag Nomor 0956/DJA/HM.02.3/III/2019, tanggal 18 Maret 2019 hal Penggunaan Aplikasi Pendukung SIPP untuk memonitor dan mencetak laporan keuangan perkara.

Gambar Tampilan Aplikasi E-Keuangan



Fungsi Aplikasi

1. Sebagai salah satu sarana validasi data keuangan perkara.
2. Sebagai sarana pencetakan buku-buku keuangan perkara.
3. Sebagai sarana melakukan pelaporan keuangan perkara.

10. Validasi Akta Cerai

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
KELAS IB

APLIKASI VALIDASI AKTA CERAI
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Nomor Akta Cerai: Nomor Seri Akta Cerai:

Nomor Perkara	Nomor Akta Cerai	Nomor Seri Akta Cerai	Tanggal Akta Cerai	Tahun Akta Cerai	Jenis Perkara	Penggugat/Pemohon	Tergugat/Termohon
---------------	------------------	-----------------------	--------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------

** Catatan : Validasi Akta Cerai ini hanya untuk Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Muara Enim
Jika data tidak sesuai mohon diperiksa Nomor Akta Cerai dan Nomor Seri Akta Cerai (harus sesuai dengan asli)
Untuk penginputan Nomor Seri Akta Cerai menggunakan "F." kemudian menggunakan "spasi"

CONTOH PENGINPUTAN NOMOR AKTA CERAI, DAN NOMOR SERI AKTA CERAI
NOMOR AKTA CERAI : 25/AC/2020/PA ME
NOMOR SERI AKTA CERAI : F. 00829

© 2020 by Tim IT Pengadilan Agama Martapura OKU Timur Sum.Sel | Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Fungsi Aplikasi

Sebagai sarana verifikasi dan validasi Akta Cerai dengan cara menginput nomor seri dan nomor akta cerai.

11. Gugatan Mandiri

Menfasilitasi para pihak sebagai pengguna layanan peradilan dalam membuat gugatan/permohonan mandiri secara online.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Gugatan / Permohonan Mandiri

Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan. Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri.

Sudah Siapkah Anda?

Persiapkan Persyaratan, Data dan Informasi diri anda untuk memulai membuat Gugatan / Permohonan Secara Mandiri, ikuti setiap langkah yang akan disediakan oleh sistem.

Bab VI

Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar setiap tugas yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dari sekian bentuk pengawasan, maka pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan itu sendiri.

Landasan hukum pelaksanaan pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Agama Muara Enim yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 001/SK/11/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/006/SK/III/1994, tanggal 31 Maret 1994, tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006, tanggal 19 Oktober 2006, tentang Tanggung Jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Pengawasan.
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007, tanggal 24 Agustus 2007, tentang Pemberlakuan Buku I.
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007, tanggal 29 Agustus 2007, tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan.

Dalam membantu pimpinan melakukan pengawasan bidang pada kepaniteraan dan kesekretariatan tahun 2021, Ketua Pengadilan Agama Muara Enim menetapkan dan menunjuk Koordinator Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Nomor W6-A5/1170/PS.OONII/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Koordinator Hakim pengawas Bidang dan Hakim pengawas pada pengadilan agama Muara Enim Tahun 2021. Dengan demikian adapun susunan hakim pengawas bidang pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel Susunan Hakim Pengawas Bidang

Nama	Jabatan	Bidang Pengawasan
Suspawati, S.Ag. NIP. 1976071020011220	Wakil Ketua Hakim Madya Muda	Koordinator Pengawasan
H. Tamim, S.H. NIP. 196407291988021001	Hakim Madya Utama	Manajemen Peradilan : 1. Program Kerja 2. Pelaksanaan/pencapaian target 3. Pengawasan dan pembinaan 4. Kendala dan hambatan 5. Faktor-faktor yang mendukung 6. Evaluasi kegiatan Administrasi Umum : 7. Kepegawaian 8. Keuangan DIPA 9. Inventaris BMN 10. Perpustakaan 11. Tertib persuratan dan perkantoran
Hj. Sabariah, S.Ag., S.H. NIP. 196903061997032004	Hakim Madya Muda	Administrasi Perkara : 1. Prosedur penerimaan perkara 2. Prosedur penerimaan permohonan banding 3. Prosedur penerimaan permohonan kasasi 4. Prosedur penerimaan permohonan PK 5. Ketepatan pengiriman berkas banding, kasasi, PK 6. Keuangan perkara dan biaya proses serta konsinyasi 7. Pemberkasan perkara dan kearsipan 8. Pelaporan perkara dan keuangan perkara serta pengelolaan PNPB
Yeni Kurniati, S.H.I. NIP. 198303252006042003	Hakim Pratama Utama	Administrasi Persidangan, penyitaan dan pelaksanaan putusan (eksekusi) : 1. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim 2. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara 3. Minutasi perkara 4. Pelaksanaan putusan (eksekusi), sita dan pelelangan
Weri Siswanto BAD, S.H.I. NIP. 198204252009121003	Hakim Pratama Madya	Pengelolaan IT dan SIPP : 1. Aplikasi SIPP dan SIADPA 2. Aplikasi website kantor 3. Aplikasi Siwas Kinerja pelayanan publik : 1. Pengelolaan manajemen 2. Mekanisme pengawasan 3. Kepemimpinan 4. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia 5. Pemeliharaan/perawatan inventaris 6. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian 7. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara 8. Proses pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya

A. Internal

Pengawasan internal oleh Pengadilan Agama Muara Enim dilakukan dengan 1 (satu) sistem pengawasan, yaitu pengawasan langsung ke objek dan telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali. Pengawasan internal dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pengawasan Melekat (Waskat)

Pengawasan dari atasan langsung terhadap bawahannya, baik secara preventif maupun represif, agar pelaksanaan tugas bawahan itu berjalan sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilakukan secara rutin setiap bulan dan secara berkala, di samping itu juga dilakukan dengan cara mengadakan rapat-rapat rutin / berkala, rapat pimpinan dan musyawarah setiap permasalahan yang timbul serta mengawasi dan mengevaluasi tugas-tugas pokok peradilan.

Hakim Pengawasan Bidang (Hawasbid)

Hakim Pengawasan Bidang melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala 1 x 1 bulan atau 12 kali dalam satu tahun sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim, dan setelah melakukan pengawasan setiap hakim pengawas bidang menyampaikan laporannya secara berkala 1 x 3 bulan kepada Ketua melalui Wakil Ketua (Koordinator Pengawasan) untuk ditindak lanjuti. Ketua Pengadilan membuat laporan tidak lanjut atas penemuan penemuan dari hakim pengawas bidang tersebut setelah hal tersebut di tindaklanjuti.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan meliputi bidang :

1. Bidang Manajemen Peradilan
 - Pembinaan sumber daya manusia.
 - Tertib perkantoran dan rumah tangga.
 - Program kerja dan *job descriptions* pegawai.
 - Ketertiban tata kelola persuratan dan pengarsipannya.

- Penatausahaan dan pengelolaan perpustakaan.
2. Bidang Kinerja Pelayanan Publik
 - Penataan meja informasi dan petugas-petugasnya.
 - Kecepatan dan ketepatan pelayanan baik dalam permintaan informasi perkara, program kerja, fatwa, dan lainnya yang berkaitan dengan tugas-tugas pengadilan.
 - Penanganan dan tindak lanjut pelaporan dari masyarakat.
 - Ketertiban pembukuan keuangan perkara dalam register Induk Keuangan Perkara, buku jurnal, dan buku bendahara.
 - Laporan keuangan perkara setiap bulannya dan laporan penerimaan serta pengeluaran PNBPNP.
 - Ketertiban pembukuan biaya proses.
 - Realisasi keuangan biaya prodeo dan posbakum.
 3. Bidang Administrasi Persidangan
 - Prosedur pendaftaran perkara gugatan, permohonan, *verzet*, *derden verzet*.
 - Prosedur pendaftaran *Isbat Rukyah Hilal*.
 - Prosedur pemanggilan dan pemberitahuan.
 - Pembuatan Berita Acara Sidang.
 - Proses pemeriksaan dan putusan.
 - Tertib persidangan.
 - Prosedur pendaftaran banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
 - Ketepatan pengiriman berkas perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
 - Proses pelaksanaan eksekusi, sita, dan pelelangan umum.
 4. Bidang Administrasi Perkara
 - Ketepatan waktu minutasi.
 - Ketepatan waktu pelapor perkara.
 - Ketertiban pembuatan laporan perkara sesuai pola BINDALMIN.

- Ketertiban penyimpanan arsip pada para perkara.
- Ketertiban penyimpanan berkas minutasi dan arsip pelaporan perkara.
- Ketertiban penata usaha arsip perkara.
- Penulisan data perkara ke dalam buku register perkara.
- Penulisan data mediasi ke dalam buku register mediasi.
- Ketertiban penyimpanan dokumen register perkara.
- Ketertiban penulisan ke dalam semua buku register perkara.

5. Bidang Pengelolaan IT dan SIPP

- *Up date* data/informasi kedalam website.
- Backup database perkara pada SIPP.
- Backup database lain aplikasi pendukung SIPP
- Maintenance jaringan internet dan LAN;
- Maintenance SIPP
- Maintenance Website
- Maintenance Antrian PTSP
- Maintenance perangkat teleconference, kios *touch screen*, TV media, CCTV dan server.

6. Bidang Umum

- Tingkat kesejahteraan pegawai seperti kenaikan pangkat, KGB, dan hak-hak pegawai lainnya.
- Tingkatkan kedisiplinan pegawai / absensi.
- Penghargaan dan hukuman pegawai.
- Ketertiban dalam administrasi Barang Milik Negara (BMN) dan pemeliharannya.
- Kebersihan dan keasrian kantor dan lingkungannya.
- Ketertiban pengelolaan parkir.
- Ketertiban pembukuan keuangan DIPA.
- Realisasi keuangan DIPA.
- Laporan keuangan DIPA.

- Laporan Pajak tahunan untuk semua pegawai.

Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah PTA Palembang

Selama tahun 2021, Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah turun sebanyak satu melakukan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Agama Muara Enim.

Pembinaan dan pengawasan oleh Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah PTA Palembang yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 9 April 2021, Tim Pembinaan dan Pengawasan di ketuai oleh Drs. H. Tamzil, S.H dan didampingi oleh Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Muhammad Daud, S.H dan Panitera Penganti Bahder Johan, S.H., M.H.

B. Evaluasi

Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Muara Enim telah melaksanakan pengawasan regular terhadap pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Muara Enim, dan evaluasi hasil pengawasan dan pembinaan yang dilakukan di Pengadilan Agama Muara Enim baik dibidang kesekretariatan maupun dibidang kepaniteraan, yaitu :

1. Evaluasi dibidang kepaniteraan khususnya pengawasan dan pembinaan dibidang administrasi perkara guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Enim. Evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan terhadap pengguna jasa layanan peradilan.
2. Evaluasi dibidang kesekretariatan khususnya pengawasan dan pembinaan pada bagian umum dan keuangan, kepegawaian

organisasi dan tata laksana, dan perencanaan teknologi informasi dan pelaporan.

3. Mengacu pada Buku IV Mahkamah Agung tentang tata laksana pengawasan peradilan yang meliputi pengawasan dan pembinaan secara rutin dan reguler, pemeriksaan keuangan dan penanganan pengaduan.

Semua hasil dari pengawasan yang dilakukan baik oleh Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) Pengadilan Agama Muara Enim maupun Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Hatibinwasda) Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah ditindak lanjuti secara keseluruhan disegala bidang objek pemeriksaan oleh unsur pimpinan Pengadilan Agama Muara Enim.

Bab VII

Penutup

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara yang ditangani tahun 2021 mencapai 98,3% yakni putus sebanyak 1.328 perkara, dimana jumlah perkara yang ditangani tersebut merupakan sisa perkara tahun 2020 sebanyak 11 perkara dan perkara diterima tahun 2021 sebanyak 1.340 perkara. Dari jumlah tersebut sisa perkara Pengadilan Agama Muara Enim sebanyak 23 perkara dengan persentase sebesar 1,70%.
2. Pelaksanaan mediasi belum begitu optimal di Pengadilan Agama Muara Enim, sehingga dari 96 perkara yang dimediasi hanya sebanyak 3 perkara yang berhasil mediasi dengan perdamaian, sedangkan sisanya sebanyak 93 perkara tidak berhasil.
3. Anggaran DIPA (01) sebesar Rp 4.468.764.000 (empat milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 4.077.750.152 (empat milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah), jumlah tersebut mencapai **91,25%** dengan sisa anggaran sebesar Rp 391.013.848 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), yakni 8,75%.
4. Anggaran DIPA (04) sebesar Rp 139.650.000 (seratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus limah puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 138.225.000 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), jumlah tersebut mencapai **98,97%** dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.425.000 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), yakni 1,02%.

5. Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan bagi pejabat Eselon IV belum terlaksana secara merata dimana pada tahun 2021 masih ada dua Kepala Sub Bagian masih belum mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV.
6. Diklat Tenaga Teknis Peradilan belum merata pada tahun 2021, Diklat Teknis tersebut sangatlah dibutuhkan sekali oleh SDM Tenaga Teknis untuk meningkatkan kompetensinya dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis yustisial.
7. Sarana dan prasarana fasilitas perkantoran belum begitu memadai, seperti AC, Printer, TV Media dan Meubelair, dimana kondisinya sebagian besar sudah rusak ringan sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup besar.

B. Rekomendasi

1. Untuk lebih efektifnya pelaksanaan mediasi perlu adanya pelatihan mediator bagi para hakim secara merata.
2. Untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan perlu secara terus menerus dilaksanakan pelatihan dan peningkatan ketrampilan, untuk itu perlu dilakukan pengusulan diklat terhadap SDM Teknis dan Non Teknis.
3. Untuk peningkatan sarana dan prasarana apartur Pengadilan Agama Muara Enim perlu dilakukan perencanaan dan usul yang matang terhadap penyusunan anggaran belanja satuan kerja Pengadilan Agama Muara Enim (RKA-KL).



**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

NOMOR : W6-A5/4350/OT.01.1/XII/2021

**TENTANG
PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

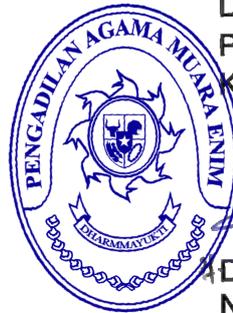
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *accountability* untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan efektif, maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyeleksi bahan laporan, menyusun narasi dan mengoreksi konsep laporan sehingga dapat dibuat laporan pelaksanaan kegiatan yang akurat, lengkap dan tepat sasaran sesuai dengan *outline* yang ditentukan;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2020 Pengadilan Agama Muara Enim;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3111/SEK/OT.01.1/12/2021 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM.
- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk menjadi Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Muara Enim.
- KEDUA** : Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Muara Enim bertugas : :
- 1) Mengumpulkan dan menyeleksi bahan laporan, menyusun narasi dan mengoreksi konsep laporan sehingga dapat dibuat laporan pelaksanaan kegiatan yang akurat, lengkap dan tepat sasaran sesuai dengan *outline* yang ditentukan;
 - 2) Memastikan finalisasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Muara Enim hingga pencetakan agar siap untuk disampaikan pada Minggu ke tiga bulan Januari 2021;
 - 3) Melakukan rapat teknis dalam rangka pelaksanaan tugas di atas baik internal Pokja maupun rapat dengan Penanggungjawab, Koordinator maupun Anggota Pokja Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Muara Enim; dan
 - 4) Melaksanakan administrasi dan surat menyurat dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas.
- KETIGA** : Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Muara Enim bertugas terhitung mulai bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2021 dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim selaku Penanggung Jawab Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Muara Enim.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Muara Enim.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 14 Desember 2021
Ketua,

[Handwritten signature]
Drs. Husaini, S.H., M.H.
NIP. 196812191994031001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. YM. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
Nomor : W6-A5/4350/OT.01.1/XII/2021
Tanggal : 14 Desember 2021
Tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja)
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun
2021 Pengadilan Agama Muara Enim

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Penanggung Jawab : Drs. Husaini, S.H., M.H.
(Ketua Pengadilan Agama Muara Enim)

Koordinator : Suspawati, S.Ag.
(Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Enim)

Sekretaris : Syam Ratulangi, S.H.
(Sekretaris Pengadilan Agama Muara Enim)
Drs. Efendi.
(Panitera Pengadilan Agama Muara Enim)

**Bagian Pengawasan
Anggota** : H. Tamim, S.H. (Hakim)
1. Hj. Sabariah, S.Ag., S.H (Hakim)
2. Yeni Kurniati, S.H.I. (Hakim)

**Bagian Peningkatan Pelayanan Publik
Anggota** : Weri Siswanto BAD, S.H.I. (Hakim)
Suprayogi Pamungkas, S.H. (Jurusita)

**Bagian Manajemen Perkara
Anggota** : Firdaus, S.H.I. (Panitera Muda Hukum)
Rendy A, S.H.I. (Panitera Muda Gugatan)
Azhari S.H., M.Si. (Panitera Muda Permohonan)
Maryam S.H (Panitera Pengganti)
Luthfi Hadisaputra, S.H. (Panitera Pengganti)
Fanani (Jurusita)
Kaim Nahrudin, S.H. (Jurusita)
Arjuni, S.H. (Honorar/Staf Pamud Hukum)
Diana Caesarianti, A.Md. (Honorar/Staf Panmud
Gugatan)

Bagian SDM : Yeni Puspita, S.Ag.
(Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana)

- Anggota : Zayan Rohanda, S.H.
(Staf Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana)
- Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana Anggota : Rahmi Oktaria, S.H.I.
(Kasubbag Umum dan Keuangan)
: 1. Ary Puspita Yudha, S.T.
(Staf Umum dan Keuangan)
2. Yessi Puspitasari, A.Md.
(Staf Umum dan Keuangan)
3. Ari Cahyadi
(Honorar/Staf Umum dan Keuangan)
- Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan Anggota : Azuardi Rizal, S.S.I.
(Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan)
: 1. Novita Anggraini, S.S.I.
(Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan)
2. Nopriyansyah, S.Kom
(Honorar/Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan)



Ketua,

Drs. Husaini, S.H., M.H.
NIP. 196812191994031001



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB



Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas SH No. 1
Muara Enim - 31312



(0734) 7420107, 7420108



pa.muaraenim@gmail.com